



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MODUL AJAR · BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION

Pengantar Ilmu Politik

Kode 3KKFS501 · 3 sks · Semester 1
Kurikulum 2023

Penyusun

Purwanto, S.IP., M.Si.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik · Universitas Ichsan Gorontalo · 2025

IDENTITAS MODUL

Judul Modul	Modul Ajar Pengantar Ilmu Politik
Mata Kuliah	Pengantar Ilmu Politik
Kode Mata Kuliah	3KKFS501
Rumpun Mata Kuliah	MKWF (Mata Kuliah Wajib Fakultas)
Bobot	3 sks (Teori = 2, Praktik = 1)
Semester	1 (satu)
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada
Program Studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo
Kurikulum	Kurikulum 2023 berbasis Outcome-Based Education (OBE)
Dokumen Acuan	RPS-3KKFS501 Pengantar Ilmu Politik
Penyusun	Purwanto, S.IP., M.Si. (NIDN 0926096601)
Penelaah	
Versi / Tahun	1.0 / 2025

Hak Penggunaan

Modul ini merupakan bahan ajar internal Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Ichsan Gorontalo. Penggunaan untuk kepentingan perkuliahan diperkenankan dengan tetap mencantumkan sumber.

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Ajar **Pengantar Ilmu Politik** (3KKFS501) telah ditelaah dan disahkan sebagai bahan ajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Disusun oleh, Penyusun

Ditelaah oleh, Koordinator RMK

Purwanto, S.IP., M.Si.

NIDN. 0926096601

.....

NIDN.

Disetujui oleh, Ketua Program Studi

Mengetahui, Dekan FISIP

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

NIDN. 0930048307

.....

NIDN.

Gorontalo, ... 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Ajar **Pengantar Ilmu Politik** ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai bahan belajar utama bagi mahasiswa semester pertama Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, dan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah berkode 3KKFS501 dalam Kurikulum 2023 yang dikembangkan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).

Pengantar Ilmu Politik adalah pintu masuk bagi mahasiswa untuk memahami gejala politik secara ilmiah. Konsep-konsep seperti kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, ideologi, sistem politik, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi akan terus dipakai di hampir semua mata kuliah berikutnya. Karena itu, modul ini tidak hanya menjelaskan konsep dan teori, tetapi juga melatih mahasiswa menerapkannya untuk membaca dinamika politik lokal di Kawasan Timur Indonesia, politik nasional, dan isu global.

Setiap unit dalam modul ini diturunkan dari satu Sub-CPMK dan dilengkapi dengan pemantik, uraian materi, studi kasus, aktivitas pembelajaran, latihan, serta umpan balik untuk mengukur tingkat penguasaan secara mandiri. Seluruh unit terhubung dengan proyek akhir berupa laporan analisis politik komprehensif yang dipresentasikan secara kritis di depan kelompok sebaya. Nilai dasar ICHSA-N Universitas Ichsan Gorontalo, yaitu *Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability*, dan *Nationalism*, diintegrasikan ke dalam aktivitas dan penilaian.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Fakultas dan Program Studi, rekan dosen, serta semua pihak yang telah memberi masukan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul pada edisi berikutnya.

Gorontalo, 2025

Penyusun,

Purwanto, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

Identitas Modul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah	1
1.3 Capaian Pembelajaran	2
1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul	3
1.5 Peta Alur Belajar	5
1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Akhir	5
1.7 Sistem Penilaian	6
1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut	7
BAB II Konsep Dasar dan Perkembangan Ilmu Politik.....	8
BAB III Negara, Sistem Pemerintahan, dan Legitimasi Kekuasaan	15
BAB IV Teori Kekuasaan Klasik dan Kontemporer	22
BAB V Sistem Politik dan Model Demokrasi	29
BAB VI Relasi Kekuasaan dan Demokrasi Lokal	35
BAB VII Kepemiluan dan Partisipasi Politik.....	42
BAB VIII Laporan Analisis Politik Komprehensif	49
BAB IX ASESMEN SUMATIF DAN INTEGRASI PENILAIAN	55
9.1 Prinsip Asesmen	55
9.2 Peta Komponen Penilaian dan Sub-CPMK	55
9.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS.....	56
9.4 Ketentuan dan Kisi-Kisi UAS	57
9.5 Rubrik Penilaian Komponen.....	58
9.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan.....	59
Glosarium.....	60
Daftar Pustaka	62
Lampiran	63
Lampiran 1 Formulir Pengajuan Topik Proyek Akhir	63
Lampiran 2 Templat Annotated Bibliography.....	64
Lampiran 3 Templat Matriks Klasifikasi Negara, Sistem Pemerintahan, dan Legitimasi	65
Lampiran 4 Templat Matriks Analitis Teori Kekuasaan	66
Lampiran 5 Formulir Peer Evaluation Presentasi	67
Lampiran 6 Lembar Kontribusi Individu	68
Lampiran 7 Lembar Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan GenAI.....	69
Lampiran 8 Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul	70

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini dirancang untuk dipelajari secara bertahap, satu unit untuk setiap Sub-CPMK. Ikuti petunjuk berikut agar proses belajar terarah pada capaian pembelajaran yang ditetapkan.

A. Petunjuk bagi Mahasiswa

1. Pelajari **Bab I** terlebih dahulu untuk memahami capaian pembelajaran, peta alur belajar, proyek akhir, dan sistem penilaian mata kuliah.
2. Pelajari unit secara berurutan sesuai peta alur belajar. Konsep pada unit awal menjadi alat analisis pada unit berikutnya.
3. Di awal setiap unit, baca rumusan **Sub-CPMK** dan **indikator capaian** agar Anda mengetahui kemampuan yang harus dikuasai dan bukti yang akan dinilai.
4. Tanggapi **pemantik** sebelum membaca uraian materi. Tuliskan jawaban awal Anda, lalu bandingkan dengan pemahaman setelah mempelajari materi.
5. Kerjakan **aktivitas pembelajaran**, baik di kelas (luring) maupun melalui LMS (daring), termasuk kegiatan praktikum analisis kasus.
6. Kerjakan **latihan** secara jujur tanpa melihat kunci jawaban, lalu cocokkan dan hitung tingkat penguasaan Anda (lihat Subbab 1.8).
7. Lanjutkan ke unit berikutnya apabila tingkat penguasaan mencapai **70% atau lebih**. Apabila belum, pelajari kembali bagian yang belum dikuasai dan kerjakan tugas remedial.
8. Isi **refleksi diri** di akhir setiap unit sebagai bahan refleksi kritis pada laporan akhir.

B. Petunjuk bagi Dosen Pengampu

1. Gunakan modul ini bersama RPS-3KKFS501 sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan setiap minggu.
2. Sampaikan Sub-CPMK, indikator, dan kriteria penilaian kepada mahasiswa di awal setiap unit agar asesmen berlangsung transparan.
3. Fasilitasi pembelajaran berbasis kasus (*Case-Based Learning*) dan proyek (*Project-Based Learning*); peran dosen adalah fasilitator, pemberi umpan balik, dan penjamin mutu luaran.
4. Gunakan rubrik pada unit terkait dan Bab Asesmen Sumatif untuk menilai kuis, matriks analitis, studi kasus, dan laporan akhir secara konsisten.
5. Catat nilai per Sub-CPMK sebagai dasar pengukuran ketercapaian CPMK dan CPL di SI-OBE, lalu gunakan hasilnya untuk perbaikan pembelajaran berkelanjutan.

C. Etika Akademik dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif (GenAI)

Mahasiswa wajib menjunjung kejujuran akademik (nilai *Integrity*). Seluruh karya yang dikumpulkan harus merupakan hasil kerja sendiri atau kelompok, dengan sumber yang dikutip secara benar. GenAI boleh dimanfaatkan sebagai asisten belajar dengan ketentuan berikut.

- **Diperbolehkan:** eksplorasi konsep, bantuan penyusunan kerangka tulisan, pemeriksaan tata bahasa, dan pembangkitan ide awal yang kemudian dikembangkan sendiri.

- **Dilarang:** menyerahkan luaran GenAI sebagai karya sendiri, memakai GenAI saat kuis, UTS, atau UAS kecuali diizinkan dosen, serta mengutip sumber hasil GenAI tanpa memverifikasi keberadaannya.
- **Wajib:** mencantumkan sitasi penggunaan GenAI yang memuat (a) alat yang dipakai, (b) bagian yang dibantu, (c) *prompt*, (d) modifikasi mandiri, dan (e) refleksi.

D. Penanda dalam Modul

Modul ini menggunakan kotak berwarna untuk membedakan fungsi setiap bagian.

Sub-CPMK & Indikator	Kemampuan akhir yang dituju unit dan bukti capaiannya.
Pemantik	Pertanyaan atau fenomena pembuka untuk mengaktifkan pengetahuan awal.
Studi Kasus	Kasus politik lokal, nasional, atau global untuk latihan analisis.
Aktivitas	Langkah kerja individu atau kelompok, di kelas maupun melalui LMS.
Latihan & Umpan Balik	Soal atau tugas formatif beserta kunci jawaban atau rubrik.
Refleksi	Pertanyaan untuk merenungkan proses dan capaian belajar.
Nilai ICHSA-N	Penguatan nilai dasar Universitas Ichsan Gorontalo dalam aktivitas.

BAB I

PENDAHULUAN

Orientasi mata kuliah, capaian pembelajaran, alur belajar, dan sistem penilaian

1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah **Pengantar Ilmu Politik** (3 sks) merupakan mata kuliah wajib yang membekali mahasiswa dengan landasan konseptual dan analitis untuk mengkaji gejala politik secara sistematis. Cakupannya meliputi konsep kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, ideologi, sistem politik, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat sesuai Bahan Kajian BK-01 dan BK-08.

Mata kuliah ini berposisi sebagai fondasi kurikuler yang menghubungkan ilmu politik, ilmu pemerintahan, sosiologi, dan filsafat ilmu, sehingga menjadi prasyarat konseptual bagi mata kuliah analitis dan terapan di semester berikutnya. Melalui pendekatan *Case-Based Learning* berbasis kasus politik lokal Kawasan Timur Indonesia (KTI), nasional, dan global, mahasiswa berlatih membandingkan teori klasik dan kontemporer secara kritis serta menganalisis dinamika politik aktual yang dituangkan dalam laporan analisis berbasis fakta empiris.

1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah

Sebagai mata kuliah semester pertama, Pengantar Ilmu Politik tidak mensyaratkan pengetahuan awal khusus. Mahasiswa cukup membawa pengalaman sehari-hari sebagai warga negara: mengikuti berita, mengamati pemilu dan pilkada, atau melihat bagaimana keputusan publik dibuat di lingkungannya. Pengalaman itu akan diolah menjadi pemahaman ilmiah.

Kemampuan yang dibangun menguatkan CPL-02 (penguasaan konsep teoretis ilmu politik dan pemerintahan) dan CPL-06 (analisis dinamika politik, kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi). Kedua kemampuan tersebut menjadi bekal bagi lulusan yang berkiprah sebagai analis pemerintahan dan kebijakan, aparatur pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu, peneliti, maupun pegiat masyarakat sipil.

Tabel 1.1 Keterampilan abad ke-21 (4C) dan nilai ICHSA-N

Kompetensi 4C	Wujud dalam pembelajaran	Nilai ICHSA-N
Critical thinking	Menganalisis kasus kekuasaan lokal KTI dengan matriks teori klasik-kontemporer dan menilai kesenjangan teori-realitas dalam kuis dan esai UTS.	Integrity, Adaptability
Creative thinking	Merancang matriks analitis orisinal tentang asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan, lalu mengembangkannya menjadi laporan analisis politik komprehensif.	Creativity
Communication	Mempresentasikan temuan studi kasus di depan kelompok sebaya, merespons pertanyaan kritis, dan merevisi laporan berdasarkan umpan balik.	Service

Kompetensi 4C	Wujud dalam pembelajaran	Nilai ICHSA-N
Collaboration	Bekerja dalam kelompok 3–4 orang yang beragam latar daerah asal untuk mengklasifikasikan kasus, menyusun matriks, dan menulis laporan.	Harmony, Nationalism

1.3 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran disusun berjenjang: CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan menjadi CPMK, lalu dirinci menjadi Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir pada setiap tahap belajar. Setiap Sub-CPMK menjadi dasar satu unit dalam modul ini.

1.3.1 CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Tabel 1.2 CPL yang dibebankan

Kode	Rumusan CPL
CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.
CPL-06	Mampu menganalisis dinamika politik, kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat pada aras lokal, nasional, maupun global.

1.3.2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel 1.3 Rumusan CPMK

Kode	Rumusan CPMK
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu politik—meliputi kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, dan ideologi—beserta perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmiah dalam konteks akademik pemerintahan.
CPMK2	Mahasiswa mampu membandingkan teori-teori klasik dan kontemporer dalam ilmu politik—termasuk teori kekuasaan, sistem politik, dan demokrasi—sebagai landasan konseptual untuk mengkaji gejala politik secara sistematis dan kritis.
CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika politik aktual—mencakup relasi kekuasaan, praktik demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat—pada aras lokal (termasuk Kawasan Timur Indonesia), nasional, maupun global, yang dituangkan dalam laporan analisis politik berbasis fakta empiris.

1.3.3 Kemampuan Akhir Tiap Tahap Belajar (Sub-CPMK)

Tabel 1.4 Rumusan Sub-CPMK

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Minggu
Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar ilmu politik—kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, dan ideologi—serta menelusuri perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmiah dalam konteks akademik pemerintahan.	CPMK1	1–2
Sub-CPMK2	Mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tipe-tipe legitimasi kekuasaan berdasarkan kriteria konseptual yang baku, disertai contoh empiris dari Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.	CPMK1	3–4

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Minggu
Sub-CPMK3	Membandingkan teori-teori kekuasaan klasik (Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau) dan kontemporer (Dahl, Foucault, Gramsci) dalam satu matriks analitis yang memuat dimensi asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan.	CPMK2	5–6
Sub-CPMK4	Menganalisis teori sistem politik (Easton, Almond) dan model-model demokrasi (liberal, deliberatif, partisipatoris) sebagai kerangka konseptual untuk menilai keberjalanan sistem politik Indonesia secara kritis.	CPMK2	7
Sub-CPMK5	Menganalisis relasi kekuasaan dan praktik demokrasi pada aras lokal—termasuk otonomi daerah dan dinamika politik di Kawasan Timur Indonesia—melalui studi kasus berbasis data empiris sekunder.	CPMK3	9–10
Sub-CPMK6	Menganalisis dinamika pemilihan dan partisipasi politik masyarakat pada konteks pemilihan umum/pilkada nasional dan lokal, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi di daerah tertinggal dan Kawasan Timur Indonesia.	CPMK3	11–13
Sub-CPMK7	Menyusun laporan analisis politik komprehensif berbasis fakta empiris yang mengintegrasikan dinamika politik lokal, nasional, dan global—mencakup relasi kekuasaan, praktik demokrasi, dan isu kontemporer—dipresentasikan secara kritis di depan kelompok sebaya.	CPMK3	14–15

1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul

Matriks berikut menunjukkan keselarasan konstruktif antara Sub-CPMK, CPMK, dan CPL. Bobot pada Tabel 1.6 merupakan kontribusi setiap Sub-CPMK terhadap pengukuran ketercapaian CPL.

Tabel 1.5 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPMK

Sub-CPMK	CPMK1	CPMK2	CPMK3
Sub-CPMK1	√	—	—
Sub-CPMK2	√	—	—
Sub-CPMK3	—	√	—
Sub-CPMK4	—	√	—
Sub-CPMK5	—	—	√
Sub-CPMK6	—	—	√
Sub-CPMK7	—	—	√

Tabel 1.6 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPL dan bobot (%)

Sub-CPMK	CPL-02	CPL-06	Bobot	Jumlah minggu
Sub-CPMK1	15	—	15	2
Sub-CPMK2	14	—	14	2
Sub-CPMK3	7	7	14	2
Sub-CPMK4	4	3	7	1
Sub-CPMK5	—	14	14	2
Sub-CPMK6	—	22	22	3
Sub-CPMK7	—	14	14	2
Jumlah	40	60	100	14

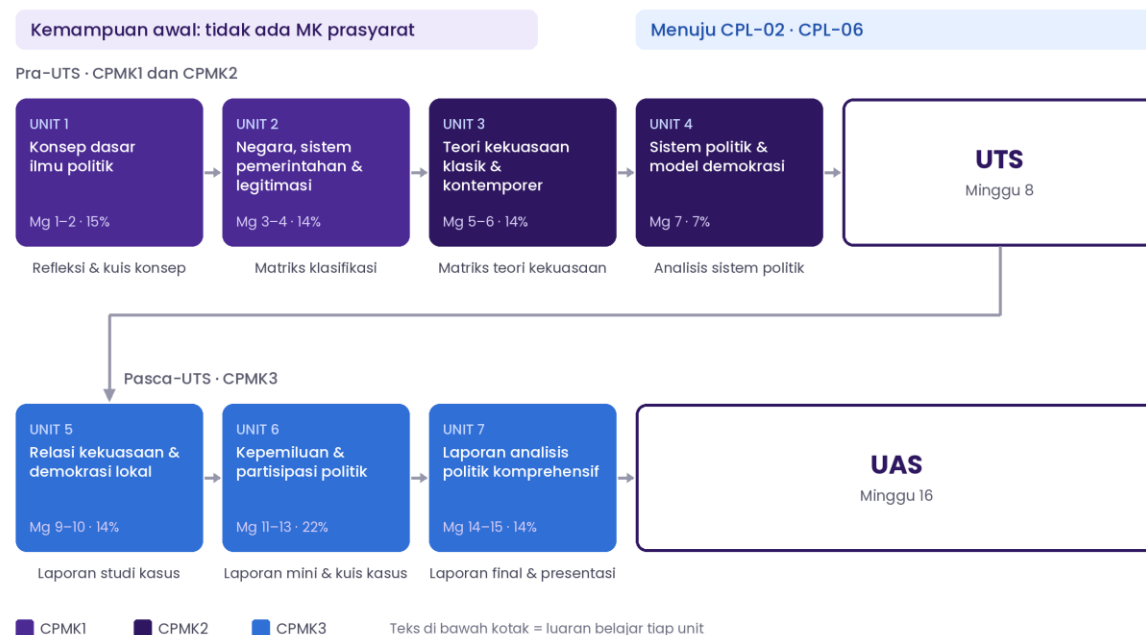
Tabel 1.7 Peta unit modul

Unit	Judul Unit	Sub-CPMK	Minggu	Luaran Belajar
1	Konsep Dasar dan Perkembangan Ilmu Politik	Sub-CPMK1	1–2	Refleksi tertulis dan kuis konsep
2	Negara, Sistem Pemerintahan, dan Legitimasi Kekuasaan	Sub-CPMK2	3–4	Matriks klasifikasi dan kuis
3	Teori Kekuasaan Klasik dan Kontemporer	Sub-CPMK3	5–6	Matriks analitis teori kekuasaan
4	Sistem Politik dan Model Demokrasi	Sub-CPMK4	7	Analisis sistem politik Indonesia
—	Evaluasi Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK1–4	8	—
5	Relasi Kekuasaan dan Demokrasi Lokal	Sub-CPMK5	9–10	Laporan studi kasus kelompok
6	Kepemiluan dan Partisipasi Politik	Sub-CPMK6	11–13	Laporan mini dan kuis kasus
7	Laporan Analisis Politik Komprehensif	Sub-CPMK7	14–15	Laporan final dan presentasi
—	Evaluasi Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK5–7	16	—

1.5 Peta Alur Belajar

Pada paruh pertama semester, mahasiswa membangun perangkat konseptual: konsep dasar, klasifikasi negara dan pemerintahan, teori kekuasaan, serta teori sistem politik dan demokrasi. Pada

paruh kedua, perangkat itu dipakai untuk menganalisis relasi kekuasaan dan demokrasi lokal, pemilihan, dan partisipasi politik, lalu diintegrasikan dalam laporan analisis politik komprehensif.



Gambar 1.1 Peta alur belajar dan luaran tiap unit

1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Akhir

1.6.1 Model, Metode, dan Modalitas

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dengan metode *Case-Based Learning* untuk mengoperasionalkan konsep dan teori, serta *Project-Based Learning* untuk menghasilkan laporan analisis politik komprehensif. Teknik yang digunakan antara lain tanya-jawab Socratic, diskusi komparatif kelompok, debat terstruktur, presentasi, dan *peer review*. Komponen praktikum (1 sks) diisi dengan latihan analisis kasus, penelusuran data empiris sekunder, dan penyusunan matriks analitis.

Perkuliahan dilaksanakan secara bauran (*blended learning*): sesi luring di kelas untuk diskusi, presentasi, dan umpan balik; sesi daring melalui LMS untuk video pengantar, bahan bacaan, forum diskusi, kuis pra-kelas, dan pengumpulan tugas.

Tabel 1.8 Estimasi beban belajar per minggu (3 sks: teori 2, praktik 1)

Bentuk Kegiatan	Rincian	Waktu
Kegiatan Belajar Terbimbing (PB)	Tatap muka atau sinkron: 2 × 50 menit	100 menit
Praktikum (P)	Latihan analisis kasus dan data: 1 × 170 menit	170 menit
Penugasan Terstruktur (PT)	Tugas individu atau kelompok: 2 × 60 menit	120 menit
Kegiatan Mandiri (KM)	Membaca, menelusuri data, refleksi: 2 × 60 menit	120 menit
Jumlah		510 menit

1.6.2 Proyek Akhir

Proyek akhir mata kuliah berjudul "**Laporan Analisis Politik Komprehensif Berbasis Data Empiris dan Presentasi Kritis di Depan Kelompok Sebaya**". Mahasiswa bekerja dalam kelompok beranggotakan 3–4 orang yang disusun dosen dengan memperhatikan keberagaman daerah asal. Setiap kelompok memilih satu kasus politik lokal atau regional di KTI, misalnya dinamika pilkada, konflik otonomi daerah, praktik klientelisme, atau rendahnya partisipasi pemilih, lalu menganalisisnya dengan kerangka teori kekuasaan, sistem politik, dan model demokrasi.

Tabel 1.9 Tahapan proyek akhir

Minggu	Kegiatan dan luaran
2–3	Pembentukan kelompok, identifikasi isu, pengajuan topik dengan justifikasi relevansi teoretis (1 halaman)
4–5	Pengumpulan data empiris sekunder dan <i>annotated bibliography</i> (minimal 8 referensi)
6–8	Kajian teoretis: matriks perbandingan minimal 3 teori kekuasaan dan kerangka sistem politik/model demokrasi
9–10	Analisis inti: relasi kekuasaan, legitimasi, praktik demokrasi, dan partisipasi
11–12	Konsultasi progres wajib dengan dosen dan revisi laporan
13–14	Finalisasi laporan tertulis (3.000–4.500 kata) dan slide presentasi (10–15 slide)
15–16	Presentasi dan tanya-jawab kritis; pengumpulan laporan final dan lembar kontribusi individu

Ketentuan proyek

Kontribusi individu dibuktikan melalui lembar pembagian tugas bertanda tangan seluruh anggota dan catatan progres konsultasi. Setiap anggota wajib menjawab pertanyaan secara mandiri saat presentasi. Seluruh sumber dicantumkan secara jujur; ketentuan keterlambatan dan batas kemiripan naskah mengikuti Rencana Tugas Mahasiswa pada RPS.

1.7 Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif. Nilai akhir ditentukan oleh komponen dan bobot berikut, sedangkan ketercapaian CPL dihitung dari nilai Sub-CPMK dengan bobot pada Tabel 1.6.

Tabel 1.10 Komponen penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur
1	Kuis Konsep	20	Sub-CPMK1, 2, 3
2	Matriks Analitis	15	Sub-CPMK3, 4
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	25	Sub-CPMK1–4
4	Studi Kasus Lokal	15	Sub-CPMK5, 6
5	Ujian Akhir Semester (UAS): laporan dan presentasi	25	Sub-CPMK5–7
	Total	100	

Tabel 1.11 Konversi nilai akhir program sarjana

Nilai Akhir (Skala 100)	Huruf	Bobot	Predikat
85,00 – 100,00	A	4,00	Sangat baik
75,00 – 84,99	B	3,00	Baik
65,00 – 74,99	C	2,00	Cukup
50,00 – 64,99	D	1,00	Kurang
0,00 – 49,99	E	0,00	Mengulang

Batas minimal kelulusan mata kuliah adalah nilai D. Untuk keperluan OBE, ambang ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK ditetapkan pada skor 70. Nilai per Sub-CPMK dicatat di SI-OBE; apabila kurang dari 75% mahasiswa mencapai ambang 70 pada suatu CPL, dilakukan intervensi berupa remedial, pengayaan, sesi asistensi, atau revisi metode dan asesmen.

1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut

Di akhir setiap unit, hitung tingkat penguasaan Anda terhadap latihan dengan rumus berikut.

Rumus tingkat penguasaan

$$\text{Tingkat penguasaan} = (\text{skor yang diperoleh} \div \text{skor maksimum}) \times 100\%$$

Tabel 1.12 Kriteria penguasaan dan tindak lanjut

Tingkat Penguasaan	Kategori	Tindak Lanjut
90% – 100%	Sangat baik	Lanjut ke unit berikutnya; kerjakan kegiatan pengayaan.
80% – 89%	Baik	Lanjut ke unit berikutnya.
70% – 79%	Cukup	Lanjut ke unit berikutnya setelah meninjau bagian yang masih lemah.
< 70%	Kurang	Pelajari ulang unit, kerjakan tugas remedial, dan konsultasikan kepada dosen.

Refleksi awal

Sebelum memulai Unit 1, tuliskan dalam 3–5 kalimat: apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata "politik"? Peristiwa politik apa yang paling Anda ingat, baik di daerah asal maupun tingkat nasional? Simpan tulisan ini dan bandingkan dengan pemahaman Anda di akhir semester.

BAB II · UNIT 1 · MINGGU 1–2

Konsep Dasar dan Perkembangan Ilmu Politik

Kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, ideologi, dan sejarah disiplin ilmu politik

2.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK1

Menjelaskan konsep dasar ilmu politik—kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, dan ideologi—serta menelusuri perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmiah dalam konteks akademik pemerintahan.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menyebutkan minimal lima konsep dasar ilmu politik (kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, ideologi) beserta definisi ringkasnya secara lisan maupun tertulis.
- Menjelaskan asal-usul ilmu politik sebagai disiplin ilmiah mulai dari filsafat klasik hingga perkembangannya di abad ke-20.
- Membedakan ilmu politik dari disiplin ilmu sosial lain (sosiologi, hukum, administrasi) berdasarkan objek kajian dan pendekatannya.
- Menguraikan hubungan konseptual antara kekuasaan, legitimasi, dan ideologi serta menganalisis cara legitimasi kekuasaan dibangun dan dipertahankan di Indonesia.
- Menelusuri perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara dan posisinya di antara ideologi-ideologi besar dunia.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK1	CPL-02	15%	2 minggu (1.020 menit)

2.2 Pemantik

Mari memulai

Di sebuah desa, warga berdebat tentang penggunaan dana desa. Kepala desa merasa berhak memutuskan karena ia dipilih warga. Tokoh adat merasa pendapatnya harus didengar karena dihormati turun-temurun. Sekelompok pemuda menuntut rapat terbuka karena "uang itu milik rakyat".

Menurut Anda, apakah perdebatan ini termasuk "politik"? Siapa yang memiliki kekuasaan, dan atas dasar apa kekuasaan itu dianggap sah? Tuliskan jawaban awal Anda dalam 3–4 kalimat.

2.3 Peta Konsep



Gambar 2.1 Peta konsep Unit 1

2.4 Uraian Materi

2.4.1 Apa Itu Politik dan Ilmu Politik?

Kata politik berasal dari bahasa Yunani *polis*, yaitu negara-kota tempat warga mengurus urusan bersama. Para ilmuwan memberi definisi yang beragam, tetapi saling melengkapi. Harold Lasswell merumuskan politik sebagai persoalan *who gets what, when, and how*: siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. David Easton memandang politik sebagai **alokasi nilai-nilai secara otoritatif** bagi seluruh masyarakat. Heywood (2013) mencatat empat cara pandang tentang politik: sebagai seni memerintah, sebagai urusan publik, sebagai kompromi dan konsensus, serta sebagai kekuasaan.

Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan bersama dan cara melaksanakannya. Menurutnya, konsep-konsep pokok ilmu politik adalah **negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi nilai-nilai** dalam masyarakat.

2.4.2 Lima Konsep Dasar

Tabel 2.1 Konsep dasar ilmu politik

Konsep	Pengertian ringkas	Contoh
Kekuasaan	Kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku pihak lain sesuai kehendaknya. Weber menekankan kemampuan melaksanakan kehendak meskipun ada perlawanan.	Kepala daerah menetapkan prioritas anggaran daerah.
Negara	Organisasi politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan, serta memonopoli penggunaan paksaan yang sah di wilayahnya.	Republik Indonesia dengan wilayah dan pemerintahannya.
Kedaulatan	Kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum. Dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam (atas warga dan wilayah) dan ke luar (kemerdekaan dari negara lain).	UUD 1945 Pasal 1 ayat (2): kedaulatan berada di tangan rakyat.
Legitimasi	Keyakinan warga bahwa kekuasaan yang dijalankan adalah sah dan patut ditaati.	Presiden hasil pemilu diakui sah oleh warga dan lembaga negara.
Ideologi	Seperangkat gagasan yang menjelaskan kondisi masyarakat, menggambarkan masyarakat yang dicita-citakan, dan memberi arah tindakan politik.	Pancasila, liberalisme, sosialisme.

Kelima konsep ini saling berkaitan. Kekuasaan tanpa legitimasi cenderung bergantung pada paksaan dan mudah digugat. Ideologi sering berfungsi sebagai sumber legitimasi, karena memberi pembenaran mengapa kekuasaan dijalankan dengan cara tertentu. Negara adalah wadah tempat kekuasaan berdaulat itu dilembagakan.

2.4.3 Kedaulatan dan Legitimasi Kekuasaan

Gagasan kedaulatan modern berkembang sejak Jean Bodin pada abad ke-16. Dalam sejarah pemikiran dikenal beberapa teori tentang sumber kedaulatan: kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sekaligus menegaskan diri sebagai negara hukum.

Max Weber membedakan tiga tipe legitimasi: **tradisional** (bersumber dari adat dan tradisi turun-temurun), **karismatik** (bersumber dari kualitas pribadi pemimpin yang luar biasa), dan **rasional-legal** (bersumber dari aturan hukum dan prosedur yang disepakati). Dalam praktik, ketiganya sering hadir bersamaan. Seorang kepala daerah di KTI, misalnya, memperoleh legitimasi rasional-legal dari pilkada, tetapi juga dapat diperkuat oleh dukungan pemuka adat (tradisional) dan pesona pribadinya (karismatik). Tipologi ini akan didalami pada Unit 2.

2.4.4 Ideologi dan Pancasila

Heywood (2017) memetakan ideologi-ideologi besar dunia, antara lain liberalisme (kebebasan individu), konservatisme (tatanan dan tradisi), sosialisme (kesetaraan dan kolektivitas), nasionalisme, serta ideologi-ideologi baru seperti feminisme dan ekologiisme. Pancasila, yang dirumuskan pada masa persiapan kemerdekaan dan ditetapkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945, sering diposisikan sebagai ideologi yang memadukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa tafsir atas Pancasila dapat dipakai untuk membangun legitimasi rezim. Membandingkan cara berbagai periode kekuasaan memakai ideologi adalah latihan yang baik untuk memahami hubungan kekuasaan, legitimasi, dan ideologi.

2.4.5 Perkembangan Ilmu Politik sebagai Disiplin

Tabel 2.2 Tonggak perkembangan ilmu politik

Periode	Ciri utama	Tokoh atau peristiwa
Yunani Kuno	Filsafat politik normatif tentang negara yang baik	Plato, Aristoteles
Abad Pertengahan	Politik dipahami dalam kerangka teologi	Agustinus, Thomas Aquinas
Renaissans dan Pencerahan	Realisme politik dan teori kontrak sosial	Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau
Akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20	Ilmu politik menjadi disiplin akademik tersendiri	Berdirinya <i>American Political Science Association</i> (1903)

Periode	Ciri utama	Tokoh atau peristiwa
1948	Pemetaan bidang kajian ilmu politik	Konferensi UNESCO di Paris: teori politik, lembaga politik, partai dan opini publik, hubungan internasional
1950–1960-an	Revolusi behavioralis: studi empiris perilaku politik	Easton, Almond, Dahl, Lipset
1970-an sampai kini	Pascabehavioralisme, institusionalisme baru, pendekatan kritis	Beragam pendekatan kontemporer

2.4.6 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lain

Ilmu politik berbagi objek dengan ilmu sosial lain, tetapi memiliki fokus yang berbeda. **Sosiologi** mempelajari masyarakat dan interaksi sosial secara umum; ilmu politik memusatkan perhatian pada kekuasaan dan pengambilan keputusan publik. **Ilmu hukum** mengkaji norma dan aturan; ilmu politik mengkaji bagaimana aturan itu dibuat, diperebutkan, dan dijalankan. **Ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan** mempelajari penyelenggaraan pemerintahan; ilmu politik memberi landasan tentang sumber dan distribusi kekuasaan yang menggerakkannya. Karena itu, bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, ilmu politik adalah fondasi untuk memahami mengapa pemerintahan bekerja seperti yang terlihat.

2.5 Studi Kasus

Dana desa di Desa Tanjung Wangi (kasus ilustrasi)

Kepala Desa Tanjung Wangi terpilih dengan selisih suara tipis. Ia memutuskan menggunakan sebagian besar dana desa untuk membangun gapura dan balai pertemuan. Dewan adat menilai keputusan itu tidak dimusyawarahkan. Sekelompok pemuda membuat petisi daring menuntut transparansi, sementara pendukung kepala desa menyebut kritik itu sebagai upaya "orang kalah pemilihan". Camat akhirnya memfasilitasi musyawarah desa dengan menghadirkan semua pihak.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada desa tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Identifikasi kelima konsep dasar ilmu politik yang muncul dalam kasus ini.
2. Tipe legitimasi apa yang dimiliki kepala desa dan dewan adat?
3. Bagaimana definisi politik menurut Lasswell dan Easton dapat menjelaskan perdebatan ini?

2.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 1 — Mengenal konsep dasar ilmu politik

Luring (kelas)

- Dosen membuka kuliah dengan kasus pemantik, lalu memaparkan peta konsep dasar ilmu politik secara interaktif.
- Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok 3–4 orang untuk memetakan hubungan kekuasaan–negara–kedaulatan–legitimasi–ideologi, lalu mempresentasikan peta konsep sederhana.

Daring (LMS)

- Tonton video pengantar (15–20 menit) tentang lima konsep dasar dan perkembangan ilmu politik.
- Baca ringkasan konsep dan tulis satu pertanyaan konseptual di forum LMS sebelum sesi luring.

Luaran: Refleksi tertulis 1–2 paragraf tentang konsep politik yang paling memengaruhi kehidupan sehari-hari di daerah Anda, dikumpulkan sebelum Minggu 2.

Minggu 2 — Legitimasi, ideologi, dan Pancasila

Luring (kelas)

- Dosen menjelaskan tipologi legitimasi dan kaitannya dengan ideologi di Indonesia melalui tanya-jawab Socratic.
- Mahasiswa berpasangan membandingkan dua periode kekuasaan di Indonesia dari sisi legitimasi dan ideologi, lalu memaparkannya di kelas.
- Kuis singkat konsep (5–7 soal pilihan ganda dan isian singkat).

Daring (LMS)

- Baca ringkasan bab dan artikel berita tentang dinamika legitimasi pascareformasi.
- Tanggapi minimal satu komentar sejawat di forum LMS dengan argumen yang disertai rujukan.

Luaran: Esai analitis 400–600 kata tentang legitimasi dan ideologi pada satu periode politik Indonesia.

2.7 Rangkuman

- Politik dapat dipahami sebagai alokasi nilai secara otoritatif, perebutan sumber daya, seni memerintah, urusan publik, kompromi, dan kekuasaan.
- Lima konsep dasar ilmu politik adalah kekuasaan, negara, kedaulatan, legitimasi, dan ideologi, yang saling berkaitan.
- Weber membedakan legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-legal; ideologi sering menjadi sumber legitimasi.
- Ilmu politik berkembang dari filsafat politik klasik menjadi disiplin ilmiah modern dengan beragam pendekatan.
- Ilmu politik berfokus pada kekuasaan dan keputusan publik sehingga menjadi fondasi bagi ilmu pemerintahan.

2.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Definisi politik sebagai "alokasi nilai-nilai secara otoritatif" dikemukakan oleh ...
 - A. Harold Lasswell
 - B. David Easton
 - C. Max Weber
 - D. Jean Bodin
2. Keyakinan warga bahwa kekuasaan yang dijalankan adalah sah dan patut ditaati disebut ...
 - A. kedaulatan
 - B. ideologi
 - C. legitimasi
 - D. otoritas fisik

3. Kepemimpinan yang diterima karena kebiasaan turun-temurun menurut Weber termasuk legitimasi ...
 - A. tradisional
 - B. karismatik
 - C. rasional-legal
 - D. demokratis
4. Konferensi yang memetakan bidang kajian ilmu politik pada tahun 1948 diselenggarakan oleh ...
 - A. PBB di New York
 - B. UNESCO di Paris
 - C. APSA di Washington
 - D. Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa
5. Perbedaan utama ilmu politik dan sosiologi terletak pada ...
 - A. ilmu politik tidak mempelajari masyarakat
 - B. ilmu politik berfokus pada kekuasaan dan keputusan publik
 - C. sosiologi hanya mempelajari keluarga
 - D. sosiologi tidak menggunakan data empiris

B. Uraian

1. Jelaskan hubungan antara kekuasaan, legitimasi, dan ideologi. Berikan satu contoh dari sejarah politik Indonesia.
2. Mengapa ilmu politik penting bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan? Bedakan ilmu politik dari ilmu hukum dan ilmu administrasi.

2.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 2.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Easton mendefinisikan politik sebagai authoritative allocation of values.
2	C	Legitimasi menyangkut penerimaan warga atas keabsahan kekuasaan.
3	A	Legitimasi tradisional bersumber dari adat dan tradisi.
4	B	Konferensi UNESCO 1948 di Paris memetakan bidang kajian ilmu politik.
5	B	Ilmu politik memusatkan perhatian pada kekuasaan dan pengambilan keputusan publik.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Definisi ketiga konsep tepat (skor maksimal 8).
- Hubungan antarkonsep dijelaskan secara logis (skor maksimal 10).
- Contoh historis relevan dan dianalisis (skor maksimal 7).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Relevansi ilmu politik bagi kajian pemerintahan dijelaskan (skor maksimal 8).
- Perbedaan dengan ilmu hukum dan ilmu administrasi tepat (skor maksimal 12).
- Argumen runtut dengan istilah yang tepat (skor maksimal 5).

2.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Baca ulang Subbab 2.4.2 dan 2.4.3, lalu buat peta konsep sendiri yang menghubungkan kelima konsep dasar dengan satu contoh dari daerah Anda sebelum mengerjakan ulang soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Baca Heywood (2013) Bab 1 dan tulis catatan 300 kata tentang cara pandang politik mana yang paling tepat menjelaskan politik di daerah asal Anda.

2.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang "politik" berubah dibandingkan refleksi awal?
2. Konsep mana yang paling sulit dipahami, dan apa yang membantu Anda memahaminya?
3. Bagaimana Anda memastikan esai Anda mengutip sumber dengan jujur?

NILAI ICHSA-N

Integrity: menyampaikan pengetahuan awal secara jujur dan mengutip sumber secara benar;
Nationalism: memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.

2.12 Referensi Unit

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
 Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
 Heywood, A. (2017). *Political Ideologies: An Introduction* (6th ed.). Palgrave Macmillan.
 Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.

BAB III · UNIT 2 · MINGGU 3–4

Negara, Sistem Pemerintahan, dan Legitimasi Kekuasaan

Klasifikasi bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tipe legitimasi dengan contoh Indonesia dan KTI

3.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK2

Mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tipe-tipe legitimasi kekuasaan berdasarkan kriteria konseptual yang baku, disertai contoh empiris dari Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara (kesatuan, federasi, konfederasi) berdasarkan kriteria konseptual yang baku.
- Membandingkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semipresidensial berdasarkan struktur hubungan eksekutif-legislatif.
- Mengidentifikasi bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia beserta alasan historis dan konstitusionalnya.
- Mengklasifikasikan tipe legitimasi kekuasaan (tradisional, karismatik, rasional-legal) dan menganalisisnya dalam konteks pemerintahan daerah di KTI.
- Menyusun matriks klasifikasi yang menghubungkan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tipe legitimasi berdasarkan studi kasus pilihan.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK1	CPL-02	14%	2 minggu (1.020 menit)

3.2 Pemantik

Mari memulai

Indonesia dan Malaysia sama-sama bertetangga, sama-sama bekas jajahan, dan sama-sama memiliki daerah yang sangat beragam. Namun, Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Malaysia berbentuk federasi dengan perdana menteri.

Mengapa dua negara bertetangga dapat memilih susunan negara yang begitu berbeda? Apa akibatnya bagi daerah-daerah di dalamnya?

3.3 Peta Konsep



Gambar 3.1 Peta konsep Unit 2

3.4 Uraian Materi

3.4.1 Bentuk Negara: Kesatuan, Federasi, dan Konfederasi

Kriteria utama untuk membedakan bentuk negara adalah **letak kedaulatan dan pembagian kekuasaan** antara pemerintah pusat dan satuan-satuan wilayahnya.

Tabel 3.1 Klasifikasi bentuk negara

Bentuk	Kriteria pokok	Contoh
Negara kesatuan	Kedaulatan tunggal berada di pemerintah pusat; daerah memperoleh kewenangan melalui desentralisasi yang ditetapkan pusat.	Indonesia, Filipina, Timor-Leste, Papua Nugini
Negara federasi	Kedaulatan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian berdasarkan konstitusi; negara bagian memiliki konstitusi dan kewenangan asli.	Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Jerman
Konfederasi	Perserikatan negara-negara berdaulat untuk tujuan tertentu; setiap anggota tetap berdaulat penuh.	Amerika Serikat pada masa <i>Articles of Confederation</i> (1781–1789)

Negara kesatuan tidak identik dengan sentralisasi. Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi luas, bahkan desentralisasi asimetris melalui otonomi khusus, misalnya bagi Papua (UU 21/2001 beserta perubahannya) dan Aceh (UU 11/2006). Kewenangan daerah tetap bersumber dari pemerintah pusat melalui undang-undang.

3.4.2 Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dibedakan terutama berdasarkan **hubungan antara eksekutif dan legislatif**: bagaimana kepala pemerintahan dipilih, kepada siapa ia bertanggung jawab, dan apakah ia dapat diberhentikan oleh parlemen.

Tabel 3.2 Perbandingan sistem pemerintahan

Aspek	Presidensial	Parlementer	Semipresidensial
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana menteri	Perdana menteri, berbagi kekuasaan dengan presiden

Aspek	Presidensial	Parleментар	Semipresidensial
Cara terpilih	Dipilih rakyat untuk masa jabatan tetap	Berasal dari mayoritas parlemen	Presiden dipilih rakyat; perdana menteri bergantung pada parlemen
Pertanggungjawaban	Kepada rakyat dan konstitusi, bukan kepada parlemen	Kepada parlemen; dapat dijatuhkan mosi tidak percaya	Perdana menteri kepada parlemen; presiden kepada rakyat
Contoh	Indonesia, Amerika Serikat, Filipina	Inggris, Malaysia, Papua Nugini	Prancis, Timor-Leste

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik (UUD 1945 Pasal 1 ayat 1) dengan sistem presidensial. Amandemen UUD 1945 (1999–2002) memperkuat ciri presidensial: presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sejak 2004, masa jabatan dibatasi, dan pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Pengalaman sistem parlementer pada 1950-an, yang ditandai seringnya pergantian kabinet, menjadi salah satu latar historis pilihan tersebut.

3.4.3 Tipe Legitimasi Kekuasaan

Tabel 3.3 Tipologi legitimasi Weber

Tipe	Sumber keabsahan	Ciri	Contoh
Tradisional	Adat dan kebiasaan turun-temurun	Kepatuhan karena "memang sudah demikian sejak dulu"	Kewibawaan pemangku adat dan kesultanan di beberapa daerah KTI
Karismatik	Kualitas pribadi pemimpin yang luar biasa	Kepatuhan karena kekaguman dan kepercayaan pada sosok	Tokoh pergerakan kemerdekaan; tokoh agama yang dihormati
Rasional-legal	Aturan hukum dan prosedur yang disepakati	Kepatuhan kepada jabatan, bukan kepada orangnya	Kepala daerah hasil pilkada; pejabat yang diangkat sesuai undang-undang

Di banyak daerah KTI, ketiga tipe legitimasi hidup berdampingan. Di Gorontalo, misalnya, dikenal falsafah adat yang bersendikan syarak dan syarak yang bersendikan Kitabullah, sehingga tokoh adat dan agama memiliki pengaruh nyata di samping pejabat hasil pemilihan. Analisis politik lokal yang baik memperhatikan bagaimana legitimasi formal dan legitimasi kultural saling menguatkan atau bertentangan.

3.4.4 Menyusun Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi menghubungkan tiga dimensi dalam satu kasus. Langkahnya: (1) pilih satu negara atau satu pemerintahan daerah; (2) tentukan bentuk negaranya berdasarkan letak kedaulatan; (3) tentukan sistem pemerintahannya berdasarkan relasi eksekutif-legislatif; (4) identifikasi tipe legitimasi yang dominan dan pendukungnya; (5) berikan bukti empiris untuk setiap klasifikasi; dan (6) nilai kesesuaian ketiganya.

3.5 Studi Kasus

Kabupaten Pulau Mutiara (kasus ilustrasi)

Bupati Pulau Mutiara adalah pensiunan birokrat yang terpilih melalui pilkada. Dalam acara adat tahunan, ia dianugerahi gelar kehormatan oleh lembaga adat setempat, dan sejak itu ia sering didampingi pemangku adat dalam kunjungan ke desa. Seorang ulama muda yang sangat populer di media sosial mulai menyuarakan kritik terhadap kebijakan bupati dan diikuti ribuan warga. DPRD kabupaten terpecah antara yang mendukung dan yang mengkritik bupati.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Klasifikasikan sumber legitimasi bupati, pemangku adat, dan ulama muda menurut tipologi Weber.
2. Mengapa DPRD tidak dapat menjatuhkan bupati hanya karena berbeda pendapat? Kaitkan dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia.
3. Susun matriks klasifikasi sederhana untuk kasus ini.

3.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 3 — Klasifikasi bentuk negara dan sistem pemerintahan

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka klasifikasi bentuk negara dan sistem pemerintahan dengan contoh Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste.
- Setiap kelompok menerima kartu kasus satu negara, mengklasifikasikan bentuk negara dan sistem pemerintahannya, lalu mempresentasikan argumennya.

Daring (LMS)

- Pelajari skema dan infografis bentuk negara dan sistem pemerintahan di LMS.
- Kerjakan latihan mandiri mengidentifikasi bentuk negara dan sistem pemerintahan dari daftar negara yang disiapkan dosen.

Luaran: Tabel perbandingan tiga sistem pemerintahan (definisi, ciri, kelebihan, kelemahan, contoh negara), dikumpulkan sebelum Minggu 4.

Minggu 4 — Tipe legitimasi dan matriks klasifikasi

Luring (kelas)

- Kelompok mempresentasikan draf matriks klasifikasi (3–5 menit) dan merespons pertanyaan kritis.
- Dosen memberi umpan balik langsung tentang ketepatan kriteria dan argumen empiris.
- Kuis tertulis 8–10 soal klasifikasi berbasis deskripsi kasus.

Daring (LMS)

- Unduh panduan dan contoh matriks klasifikasi di LMS.
- Unggah draf matriks ke forum LMS untuk mendapat umpan balik sejawat sebelum sesi luring.

Luaran: Matriks klasifikasi yang menghubungkan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tipe legitimasi untuk satu kasus pilihan.

3.7 Rangkuman

- Bentuk negara dibedakan berdasarkan letak kedaulatan: kesatuan, federasi, dan konfederasi.

- Negara kesatuan dapat menerapkan desentralisasi luas, termasuk otonomi khusus, seperti Indonesia.
- Sistem pemerintahan dibedakan berdasarkan relasi eksekutif-legislatif: presidensial, parlementer, dan semipresidensial.
- Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem presidensial yang diperkuat melalui amandemen UUD 1945.
- Legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-legal sering hadir bersamaan dalam politik lokal KTI.

3.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Negara yang kedaulatannya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian berdasarkan konstitusi disebut ...
 - A. negara kesatuan
 - B. negara federasi
 - C. konfederasi
 - D. negara serikat semu
2. Ciri khas sistem parlementer adalah ...
 - A. presiden dipilih langsung dengan masa jabatan tetap
 - B. kepala pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya
 - C. tidak ada parlemen
 - D. kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
3. Contoh negara dengan sistem semipresidensial di kawasan terdekat Indonesia adalah ...
 - A. Malaysia
 - B. Papua Nugini
 - C. Timor-Leste
 - D. Filipina
4. Otonomi khusus Papua menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan ...
 - A. federalisme
 - B. desentralisasi asimetris
 - C. konfederasi
 - D. sentralisasi penuh
5. Kepala daerah yang ditaati karena terpilih melalui pilkada sesuai undang-undang memiliki legitimasi ...
 - A. tradisional
 - B. karismatik
 - C. rasional-legal
 - D. teokratis

B. Uraian

1. Bandingkan sistem presidensial dan parlementer berdasarkan relasi eksekutif-legislatif, lalu jelaskan alasan historis dan konstitusional Indonesia memilih sistem presidensial.

2. Analisis tipe legitimasi seorang kepala daerah di KTI yang Anda ketahui atau dari kasus ilustrasi. Apakah legitimasi formal dan kultural saling menguatkan atau bertentangan?

3.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 3.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Dalam federasi kedaulatan dibagi berdasarkan konstitusi.
2	B	Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan.
3	C	Timor-Leste menganut sistem semipresidensial.
4	B	Kewenangan khusus bagi daerah tertentu disebut desentralisasi asimetris.
5	C	Legitimasi bersumber dari aturan hukum dan prosedur.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Perbandingan tepat pada minimal tiga aspek (skor maksimal 10).
- Alasan historis dan konstitusional dijelaskan dengan benar (skor maksimal 10).
- Argumen runtut (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Klasifikasi tipe legitimasi tepat (skor maksimal 8).
- Analisis hubungan legitimasi formal dan kultural didukung bukti (skor maksimal 12).
- Penulisan beretika dan bersumber (skor maksimal 5).

3.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Susun ulang Tabel 3.1–3.3 dengan kata-kata sendiri dan tambahkan satu contoh baru untuk setiap kategori, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Bandingkan bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia dan Timor-Leste dalam tulisan 300 kata.

3.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Kriteria klasifikasi mana yang paling membantu Anda membedakan konsep?
2. Bagaimana Anda menanggapi kritik sejawat terhadap matriks kelompok Anda?
3. Tipe legitimasi apa yang paling berpengaruh di daerah asal Anda?

NILAI ICHSA-N

Harmony: mendengarkan dan menghargai sudut pandang berbeda dalam diskusi komparatif; **Adaptability:** menyempurnakan argumen berdasarkan pertanyaan kritis; **Nationalism:** memahami keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan.

3.12 Referensi Unit

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV · UNIT 3 · MINGGU 5–6

Teori Kekuasaan Klasik dan Kontemporer

Dari Aristoteles hingga Gramsci: asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan dalam satu matriks analitis

4.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK3

Membandingkan teori-teori kekuasaan klasik (Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau) dan kontemporer (Dahl, Foucault, Gramsci) dalam satu matriks analitis yang memuat dimensi asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi gagasan pokok setiap pemikir klasik mengenai asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan serta posisi normatifnya terhadap legitimasi.
- Mengaitkan konsep kontrak sosial (Hobbes, Locke, Rousseau) dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusionalisme Indonesia.
- Menjelaskan konsep kekuasaan menurut Dahl (pluralisme), Foucault (kuasa-pengetahuan), dan Gramsci (hegemoni) dengan tepat sesuai sumber.
- Mengintegrasikan pemikir klasik dan kontemporer ke dalam satu matriks analitis dan membandingkan minimal empat pasang pemikir.
- Mengevaluasi relevansi konsep hegemoni atau pluralisme untuk menjelaskan satu fenomena kekuasaan di Kawasan Timur Indonesia.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK2	CPL-02 dan CPL-06	14%	2 minggu (1.020 menit)

4.2 Pemantik

Mari memulai

Mengapa kita menaati aturan lalu lintas, bahkan ketika tidak ada polisi? Karena takut dihukum, karena sepakat aturan itu baik, karena sudah terbiasa, atau karena kita tidak pernah membayangkan cara lain?

Setiap jawaban mencerminkan satu cara memandang kekuasaan. Pilih jawaban yang paling mewakili Anda, lalu simpan untuk dibandingkan dengan teori pada unit ini.

4.3 Peta Konsep



Gambar 4.1 Peta konsep Unit 3

4.4 Uraian Materi

4.4.1 Tiga Dimensi Analisis Kekuasaan

Untuk membandingkan para pemikir secara sistematis, unit ini menggunakan tiga dimensi. **Asal** kekuasaan menjawab dari mana kekuasaan berasal (alam, Tuhan, kesepakatan, struktur sosial). **Sifat** kekuasaan menjawab seperti apa kekuasaan itu (terpusat atau tersebar, represif atau produktif). **Mekanisme** kekuasaan menjawab bagaimana kekuasaan bekerja (paksaan, hukum, persetujuan, wacana). Kolom tambahan, **implikasi legitimasi**, menjawab kapan kekuasaan dianggap sah.

4.4.2 Pemikir Klasik

Aristoteles memandang manusia sebagai *zoon politikon*, makhluk yang secara alamiah hidup dalam komunitas politik (*polis*). Ia mengklasifikasikan pemerintahan menurut jumlah penguasa dan tujuan kekuasaan: monarki, aristokrasi, dan *politeia* sebagai bentuk baik, serta tirani, oligarki, dan demokrasi (dalam arti pemerintahan massa demi kepentingannya sendiri) sebagai bentuk menyimpang.

Niccolò Machiavelli, melalui *Il Principe*, memisahkan politik dari moralitas tradisional. Kekuasaan adalah seni merebut dan mempertahankan negara; penguasa memerlukan *virtù* (kecakapan) untuk menghadapi *fortuna* (nasib). Ia menjadi pelopor realisme politik.

Thomas Hobbes, dalam *Leviathan* (1651), menggambarkan keadaan alamiah sebagai perang semua melawan semua. Untuk keluar darinya, manusia membuat kontrak sosial dan menyerahkan haknya kepada penguasa berdaulat yang absolut demi keamanan.

John Locke, dalam *Two Treatises of Government* (1689), berpendapat bahwa manusia memiliki hak kodrati atas hidup, kebebasan, dan milik. Pemerintahan dibentuk berdasarkan persetujuan yang diperintah untuk melindungi hak-hak itu; kekuasaannya terbatas, dan rakyat berhak melawan penguasa yang melanggar kepercayaan.

Jean-Jacques Rousseau, dalam *Du Contrat Social* (1762), menempatkan kedaulatan pada rakyat sebagai kesatuan yang mengekspresikan kehendak umum (*volonté générale*). Kedaulatan rakyat tidak dapat dialihkan. Gagasan ini bergema dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2): kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

4.4.3 Pemikir Kontemporer

Robert Dahl mendefinisikan kekuasaan secara relasional: A berkuasa atas B sejauh A dapat membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B jika tidak dipengaruhi. Dalam studinya tentang

New Haven, *Who Governs?* (1961), ia menyimpulkan bahwa kekuasaan dalam demokrasi tersebar di antara banyak kelompok (pluralisme). Gagasan ini dikembangkan dalam konsep poliarki (Dahl, 1971).

Michel Foucault menolak pandangan bahwa kekuasaan hanya dimiliki dan dipakai dari atas. Kekuasaan **tersebar** dalam relasi sosial, bekerja melalui disiplin, norma, dan pengetahuan, serta bersifat **produktif**: ia membentuk cara orang berpikir dan berperilaku. Konsep kuasa-pengetahuan (*power/knowledge*) menunjukkan bahwa klaim pengetahuan dan kekuasaan saling menopang (Foucault, 1980).

Antonio Gramsci memperkenalkan konsep **hegemoni**: kelompok dominan mempertahankan kekuasaan bukan terutama dengan paksaan, melainkan dengan persetujuan yang dibangun melalui kepemimpinan moral dan intelektual di masyarakat sipil, seperti sekolah, media, dan lembaga keagamaan (Gramsci, 1971). Hegemoni ditopang oleh blok historis, yaitu aliansi kekuatan sosial yang menjadikan pandangan kelompok dominan tampak sebagai akal sehat.

4.4.4 Matriks Analitis Teori Kekuasaan

Tabel 4.1 Contoh matriks analitis delapan pemikir

Pemikir	Asal kekuasaan	Sifat	Mekanisme	Implikasi legitimasi
Aristoteles	Kodrat sosial manusia dalam polis	Alamiah, bertujuan kebaikan bersama	Konstitusi dan partisipasi warga	Sah bila demi kepentingan umum
Machiavelli	Kecakapan merebut dan mempertahankan negara	Realistik, instrumental	Kekuatan, siasat, citra	Sah bila efektif menjaga negara
Hobbes	Kontrak sosial karena takut kematian	Absolut, tak terbagi	Hukum penguasa berdaulat	Sah selama menjamin keamanan
Locke	Persetujuan warga yang memiliki hak kodrati	Terbatas dan dapat dicabut	Hukum, pemisahan kekuasaan	Sah bila melindungi hak warga
Rousseau	Kehendak umum rakyat	Berdaulat, tak dapat dialihkan	Partisipasi langsung warga	Sah bila sesuai kehendak umum
Dahl	Sumber daya yang tersebar di banyak kelompok	Relasional, tersebar	Kompetisi dan tawar-menawar kelompok	Sah melalui kompetisi dan partisipasi terbuka
Foucault	Relasi sosial dan wacana	Tersebar, produktif	Disiplin, norma, pengetahuan	Legitimasi dibentuk oleh wacana
Gramsci	Struktur sosial dan aliansi kelas	Dominasi melalui persetujuan	Kepemimpinan moral-intelektual di masyarakat sipil	Sah karena diterima sebagai akal sehat

Catatan penggunaan matriks

Isian di atas adalah ringkasan awal. Dalam tugas, setiap sel harus Anda kembangkan dengan kata-kata sendiri dan dukung dengan rujukan pustaka. Matriks yang baik bukan sekadar daftar, tetapi alat untuk menjawab pertanyaan: teori mana yang paling tepat menjelaskan satu fenomena kekuasaan tertentu, dan mengapa?

4.5 Studi Kasus

Tiga skenario kekuasaan (kasus ilustrasi)

Skenario A. Di sebuah kota di Sulawesi, kebijakan penataan pasar ditentukan melalui tawar-menawar antara asosiasi pedagang, pengusaha properti, DPRD, dan dinas perdagangan; tidak ada satu pihak yang selalu menang.

Skenario B. Di sebuah kabupaten, keluarga pengusaha terbesar membiayai media lokal, beasiswa, dan kegiatan keagamaan, sehingga warga menganggap wajar bila anggota keluarga itu terus memimpin daerah.

Skenario C. Sekolah dan puskesmas di sebuah kecamatan menerapkan sistem pencatatan kehadiran dan kesehatan yang sangat rinci, sehingga warga mulai mengatur kebiasaannya agar "tercatat baik".

Catatan: skenario disusun sebagai ilustrasi pembelajaran.

Pertanyaan analisis:

1. Pasangkan setiap skenario dengan pemikir kontemporer yang paling tepat menjelaskannya. Berikan alasannya.
2. Pemikir klasik mana yang pandangannya paling bertentangan dengan Skenario B?
3. Pilih satu skenario dan analisis menggunakan dua pemikir sekaligus (satu klasik dan satu kontemporer).

4.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 5 — Pemikir klasik

Luring (kelas)

- Dosen mengklarifikasi konsep dan memoderasi diskusi antarpemikir dengan umpan balik atas draf matriks.
- Kelompok melengkapi kolom sifat dan mekanisme matriks, lalu menjelaskan satu kasus mini (misalnya kudeta atau revolusi) memakai kerangka satu pemikir klasik.

Daring (LMS)

- Tonton video kuliah tentang lima pemikir klasik secara kronologis dan unduh templat matriks.
- Baca Budiardjo Bab 2–3 dan Heywood (2013) Bab 1, lalu isi kolom "asal kekuasaan" secara individual dan unggah ke LMS.

Luaran: Draf matriks analitis lima pemikir klasik (maksimal dua halaman A4).

Minggu 6 — Pemikir kontemporer dan matriks lengkap

Luring (kelas)

- Dosen mengklarifikasi kesalahan konsep pada draf, lalu memfasilitasi debat terstruktur antarkelompok.
- Kelompok mempresentasikan matriks lengkap (8–10 menit) dan mencocokkan tiga skenario kekuasaan lokal dengan teori yang relevan.
- Kuis pendek tertulis (30 menit): menganalisis satu pernyataan kasus dengan dua pemikir.

Daring (LMS)

- Tonton video tentang Dahl, Foucault, dan Gramsci serta cara mengintegrasikannya ke matriks.
- Baca Heywood (2013) Bab 1–2 dan Dahl (1971) Bab 1–2, lalu isi baris pemikir kontemporer.

Luaran: Matriks analitis lengkap delapan pemikir dengan empat kolom, disertai argumen perbandingan.

4.7 Rangkuman

- Kekuasaan dapat dianalisis melalui dimensi asal, sifat, mekanisme, dan implikasi legitimasi.
- Aristoteles menekankan kodrat politik manusia; Machiavelli realisme; Hobbes kedaulatan absolut; Locke pemerintahan terbatas; Rousseau kedaulatan rakyat.
- Dahl melihat kekuasaan tersebar di antara kelompok; Foucault melihatnya tersebar dan produktif melalui wacana; Gramsci menekankan hegemoni melalui persetujuan.
- Teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat berkaitan langsung dengan konstitusionalisme Indonesia.
- Matriks analitis membantu memilih teori yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena kekuasaan tertentu.

4.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pemikir yang menggambarkan keadaan alamiah sebagai "perang semua melawan semua" adalah ...
 - A. Locke
 - B. Rousseau
 - C. Hobbes
 - D. Aristoteles
2. Gagasan bahwa rakyat berhak melawan penguasa yang melanggar hak kodrati warga paling dekat dengan pemikiran ...
 - A. Hobbes
 - B. Locke
 - C. Machiavelli
 - D. Gramsci
3. Konsep *volonté générale* (kehendak umum) dikemukakan oleh ...
 - A. Rousseau
 - B. Dahl
 - C. Foucault
 - D. Aristoteles
4. Kekuasaan yang bekerja melalui persetujuan yang dibangun di sekolah, media, dan lembaga keagamaan disebut ...
 - A. poliarki
 - B. hegemoni
 - C. kontrak sosial
 - D. virtù

5. Pandangan bahwa kekuasaan bersifat tersebar dan produktif, bukan hanya represif, dikemukakan oleh ...
- Hobbes
 - Dahl
 - Foucault
 - Machiavelli

B. Uraian

1. Bandingkan Hobbes dan Locke pada dimensi asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan. Pandangan siapa yang lebih dekat dengan UUD 1945? Jelaskan.
2. Gunakan konsep hegemoni Gramsci atau pluralisme Dahl untuk menjelaskan satu fenomena kekuasaan di Kawasan Timur Indonesia. Mengapa teori itu lebih tepat daripada teori lainnya?

4.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 4.2 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	C	Hobbes dalam Leviathan menggambarkan keadaan alamiah yang penuh konflik.
2	B	Locke menegaskan pemerintahan terbatas dan hak rakyat untuk melawan.
3	A	Rousseau menempatkan kedaulatan pada kehendak umum rakyat.
4	B	Gramsci menyebutnya hegemoni.
5	C	Foucault memandang kekuasaan tersebar dan membentuk perilaku melalui norma dan pengetahuan.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Perbandingan tepat pada tiga dimensi (skor maksimal 12).
- Kaitan dengan UUD 1945 dijelaskan secara tepat (skor maksimal 8).
- Argumen runtut dan bersumber (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Konsep dijelaskan dengan tepat (skor maksimal 8).
- Penerapan pada fenomena nyata atau ilustratif dianalisis mendalam (skor maksimal 10).
- Justifikasi pemilihan teori dibandingkan teori lain (skor maksimal 7).

4.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Lengkapi ulang Tabel 4.1 dengan kata-kata sendiri untuk setiap pemikir, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Baca Dahl (1971) Bab 1 dan tulis ulasan 400 kata tentang delapan jaminan institusional poliarki dan penerapannya di Indonesia.

4.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Jawaban pemantik Anda paling dekat dengan pemikir mana?
2. Pemikir mana yang paling sulit dipahami, dan bagaimana Anda mengatasinya?
3. Bagaimana Anda membedakan pendapat Anda sendiri dari pendapat pemikir yang dikaji?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan **Harmony**: mengacu sumber secara eksplisit, membedakan gagasan sendiri dari gagasan pemikir, dan menghargai keberagaman tafsir dalam debat; **Creativity**: merancang matriks analitis yang orisinal.

4.12 Referensi Unit

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2017). *Political Ideologies: An Introduction* (6th ed.). Palgrave Macmillan.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Machiavelli, N. (1532/2009). *The Prince*. Penguin Classics.
- Rousseau, J.-J. (1762/1968). *The Social Contract*. Penguin Classics.
- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press. (bacaan pengayaan)

BAB V · UNIT 4 · MINGGU 7

Sistem Politik dan Model Demokrasi

Model sistem Easton, fungsi sistem Almond, dan tiga model demokrasi untuk menilai sistem politik Indonesia

5.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK4

Menganalisis teori sistem politik (Easton, Almond) dan model-model demokrasi (liberal, deliberatif, partisipatoris) sebagai kerangka konseptual untuk menilai keberjalanan sistem politik Indonesia secara kritis.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menguraikan komponen model sistem politik Easton (input, proses, output, umpan balik) dan fungsi-fungsi sistem Almond dengan tepat.
- Membedakan model demokrasi liberal, deliberatif, dan partisipatoris berdasarkan asumsi tentang kedaulatan rakyat, peran warga, dan mekanisme pengambilan keputusan.
- Menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian model demokrasi dengan praktik sistem politik Indonesia menggunakan minimal dua indikator empiris.
- Mengaitkan konsep input-output Easton dengan dinamika partisipasi politik masyarakat.
- Merumuskan penilaian kritis tentang model demokrasi yang paling mendekati kondisi empiris Indonesia dengan satu data atau kasus pendukung.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK2	CPL-02 dan CPL-06	7%	1 minggu (510 menit)

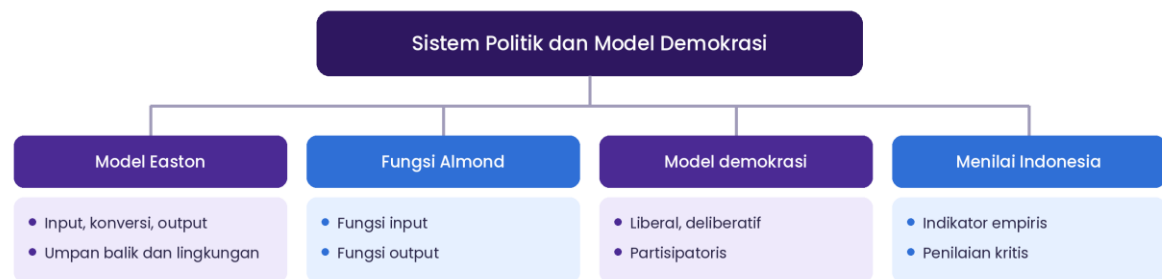
5.2 Pemantik

Mari memulai

Warga sebuah kecamatan mengeluhkan jalan rusak melalui media sosial. Anggota DPRD membawa keluhan itu ke rapat anggaran. Beberapa bulan kemudian jalan diperbaiki, dan warga yang puas kembali memilih anggota DPRD tersebut.

Coba gambarkan alur peristiwa itu sebagai sebuah "mesin": apa yang masuk, di mana diproses, apa yang keluar, dan bagaimana hasilnya kembali memengaruhi masukan?

5.3 Peta Konsep



Gambar 5.1 Peta konsep Unit 4

5.4 Uraian Materi

5.4.1 Model Sistem Politik Easton

David Easton memandang kehidupan politik sebagai sebuah **sistem** yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem menerima **input** berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*), mengolahnya dalam proses konversi, lalu menghasilkan **output** berupa keputusan dan kebijakan. Output tersebut kembali memengaruhi lingkungan dan menimbulkan tuntutan serta dukungan baru melalui **umpan balik** (*feedback*). Sistem politik bertahan apabila mampu mengelola arus tuntutan dan mempertahankan dukungan.

Tabel 5.1 Komponen sistem politik Easton

Komponen	Isi	Contoh dalam politik daerah
Lingkungan	Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan internasional	Kondisi geografis kepulauan, kemiskinan, harga komoditas
Input: tuntutan	Keinginan warga agar pemerintah bertindak	Permintaan perbaikan jalan, layanan kesehatan
Input: dukungan	Kesediaan warga menerima dan menaati sistem	Partisipasi pemilu, membayar pajak, kepatuhan hukum
Konversi	Proses pengolahan dalam lembaga politik	Pembahasan APBD oleh pemerintah daerah dan DPRD
Output	Keputusan dan kebijakan otoritatif	Perda, program pembangunan, alokasi anggaran
Umpan balik	Dampak output yang kembali menjadi input	Kepuasan atau protes warga, hasil pemilu berikutnya

5.4.2 Pendekatan Struktural-Fungsional Almond

Gabriel Almond melengkapi model Easton dengan menanyakan **fungsi** apa yang dijalankan oleh sistem politik dan **struktur** apa yang menjalankannya. Pada sisi input terdapat fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Pada sisi output terdapat fungsi pembuatan aturan, penerapan aturan, dan penghakiman atas pelanggaran aturan (Almond & Powell, 1966). Partai politik, misalnya, terutama menjalankan fungsi agregasi kepentingan dan rekrutmen politik.

5.4.3 Tiga Model Demokrasi

Tabel 5.2 Perbandingan model demokrasi

Aspek	Liberal	Deliberatif	Partisipatoris
Asumsi kedaulatan rakyat	Dijalankan melalui wakil terpilih	Dijalankan melalui musyawarah publik yang rasional	Dijalankan melalui keterlibatan langsung warga
Peran warga	Memilih dalam pemilu yang kompetitif; hak dilindungi	Berdiskusi dan menimbang alasan secara terbuka	Terlibat aktif dalam keputusan sehari-hari
Mekanisme keputusan	Suara mayoritas wakil rakyat	Konsensus atau keputusan terbaik hasil pertukaran argumen	Forum warga, referendum, anggaran partisipatif
Kritik	Warga pasif di antara pemilu	Sulit dijalankan pada skala besar	Menuntut waktu dan kapasitas warga yang tinggi

Held (2006) menunjukkan bahwa model-model demokrasi berkembang dari tradisi pemikiran yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Pancasila sila keempat, yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung unsur perwakilan sekaligus musyawarah.

5.4.4 Menilai Sistem Politik Indonesia

Penilaian kritis memerlukan indikator empiris, bukan sekadar pendapat. Beberapa sumber yang dapat dipakai antara lain Indeks Demokrasi Indonesia yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, data partisipasi pemilih dari KPU, serta laporan lembaga pemantau demokrasi. Contoh pertanyaan analisis: sejauh mana pemilu Indonesia kompetitif dan bebas (model liberal)? Sejauh mana musrenbang dan konsultasi publik benar-benar menjadi ruang musyawarah (model deliberatif)? Sejauh mana warga terlibat langsung dalam keputusan desa (model partisipatoris)?

Persiapan UTS (Minggu 8)

UTS mencakup Sub-CPMK1 sampai Sub-CPMK4 dalam bentuk esai analitis. Pelajari kembali rangkuman Unit 1–4, kerjakan ulang latihan yang belum tuntas, dan latih kemampuan mengaitkan konsep antarminggu, karena kriteria penilaian UTS mencakup ketepatan konsep, kedalaman analisis, dan keterkaitan antarkonsep. Kisi-kisi UTS disajikan pada Bab Asesmen Sumatif.

5.5 Studi Kasus

Anggaran partisipatif Kota Karang Indah (kasus ilustrasi)

Pemerintah Kota Karang Indah memperkenalkan program "Musyawarah Anggaran Kelurahan". Setiap kelurahan memperoleh pagu anggaran yang penggunaannya diputuskan warga melalui forum terbuka. Pada tahun pertama, kehadiran warga cukup tinggi, tetapi forum didominasi tokoh-tokoh yang dekat dengan lurah. Pada tahun kedua, organisasi pemuda dan kelompok perempuan menuntut aturan kuorum dan pemungutan suara terbuka. DPRD kota lalu membahas rancangan perda untuk melembagakan program tersebut.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran.

Pertanyaan analisis:

1. Petakan kasus ini ke dalam model sistem Easton (input, konversi, output, umpan balik).
2. Model demokrasi mana yang tercermin dalam program ini? Unsur model lain apa yang juga muncul?
3. Fungsi Almond apa yang dijalankan organisasi pemuda dan kelompok perempuan?

5.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 7 — Sistem politik dan model demokrasi

Luring (kelas)

- Dosen memfasilitasi diskusi kritis komparatif tiga model demokrasi dan menghubungkannya dengan model sistem Easton.
- Kelompok mendiskusikan diagram alur input-output yang telah dibuat, lalu merumuskan model demokrasi yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia dan memaparkannya (3–5 menit).
- Dosen memberi panduan persiapan UTS.

Daring (LMS)

- Tonton video tentang model sistem Easton dan struktur-fungsi Almond serta pelajari tabel perbandingan model demokrasi.
- Baca Easton (1965) Bab 1–3 dan Heywood (2013) Bab 4, lalu tandai komponen Easton pada satu diagram sistem politik.

Luaran: Diagram input-output dan penilaian kritis kelompok tentang model demokrasi Indonesia.

5.7 Rangkuman

- Easton memandang politik sebagai sistem yang mengolah input (tuntutan dan dukungan) menjadi output (keputusan dan kebijakan) dengan umpan balik.
- Almond menjelaskan fungsi input (sosialisasi, rekrutmen, artikulasi, agregasi, komunikasi) dan output (pembuatan, penerapan, dan penghakiman aturan).
- Demokrasi liberal menekankan perwakilan dan hak; deliberatif menekankan musyawarah rasional; partisipatoris menekankan keterlibatan langsung.
- Penilaian sistem politik Indonesia harus didukung indikator empiris.
- Unsur perwakilan dan musyawarah sama-sama tercermin dalam Pancasila sila keempat.

5.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Dalam model Easton, kesediaan warga membayar pajak dan menaati hukum termasuk ...
 - A. tuntutan
 - B. dukungan
 - C. output
 - D. konversi

2. Peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD dalam model Easton merupakan ...
 - A. input
 - B. lingkungan
 - C. output
 - D. umpan balik
3. Fungsi menggabungkan berbagai kepentingan menjadi alternatif kebijakan, yang terutama dijalankan partai politik, disebut ...
 - A. artikulasi kepentingan
 - B. agregasi kepentingan
 - C. sosialisasi politik
 - D. penghakiman aturan
4. Model demokrasi yang menekankan pertukaran argumen secara rasional dalam musyawarah publik adalah ...
 - A. liberal
 - B. deliberatif
 - C. partisipatoris
 - D. elitis
5. Anggaran partisipatif yang diputuskan langsung oleh warga paling dekat dengan model demokrasi ...
 - A. liberal
 - B. partisipatoris
 - C. otoriter
 - D. oligarkis

B. Uraian

1. Petakan proses lahirnya satu kebijakan daerah yang Anda ketahui ke dalam model sistem Easton. Jelaskan setiap komponennya.
2. Model demokrasi mana yang paling mendekati kondisi empiris Indonesia? Dukung penilaian Anda dengan minimal dua indikator empiris.

5.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 5.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Dukungan adalah kesediaan menerima dan menaati sistem.
2	C	Keputusan otoritatif adalah output.
3	B	Almond menyebutnya agregasi kepentingan.
4	B	Demokrasi deliberatif menekankan musyawarah rasional.
5	B	Keterlibatan langsung warga adalah ciri demokrasi partisipatoris.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Kelima komponen dipetakan dengan tepat (skor maksimal 15).
- Umpan balik dan pengaruh lingkungan dijelaskan (skor maksimal 5).
- Contoh konkret dan runtut (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Perbedaan tiga model dipahami dengan tepat (skor maksimal 8).
- Penilaian didukung minimal dua indikator empiris yang bersumber (skor maksimal 12).
- Argumen kritis dan seimbang (skor maksimal 5).

5.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Gambar ulang model sistem Easton dengan contoh dari daerah Anda sendiri dan bandingkan dengan Tabel 5.1, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Pelajari publikasi Indeks Demokrasi Indonesia terbaru untuk provinsi asal Anda dan tulis catatan 300 kata tentang aspek demokrasi yang paling lemah.

5.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Bagaimana model Easton mengubah cara Anda melihat kebijakan pemerintah?
2. Model demokrasi mana yang menurut Anda ideal, dan mengapa?
3. Apa yang perlu Anda persiapkan menjelang UTS?

NILAI ICHSA-N

Adaptability: menyesuaikan penilaian berdasarkan data empiris; **Harmony:** menyampaikan kritik terhadap sistem politik secara konstruktif tanpa mendominasi diskusi.

5.12 Referensi Unit

- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.

BAB VI · UNIT 5 · MINGGU 9–10

Relasi Kekuasaan dan Demokrasi Lokal

Otonomi daerah, relasi pusat-daerah, dan kriteria poliarki pada politik lokal Kawasan Timur Indonesia

6.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK5

Menganalisis relasi kekuasaan dan praktik demokrasi pada aras lokal—termasuk otonomi daerah dan dinamika politik di Kawasan Timur Indonesia—melalui studi kasus berbasis data empiris sekunder.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menguraikan konsep otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia.
- Menganalisis pola relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di era desentralisasi.
- Mengidentifikasi karakteristik dinamika politik lokal di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data empiris sekunder.
- Mengevaluasi sejauh mana kriteria poliarki Dahl terpenuhi dalam penyelenggaraan pilkada atau pemerintahan daerah di KTI.
- Mengonstruksi argumen berbasis bukti tentang faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan demokrasi pada aras lokal.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-06	14%	2 minggu (1.020 menit)

6.2 Pemantik

Mari memulai

Pada paruh pertama semester Anda telah mempelajari kekuasaan, legitimasi, sistem politik, dan demokrasi secara konseptual. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih dekat: seberapa demokratis politik di kabupaten atau kota asal Anda?

Apakah pilkada di daerah Anda benar-benar kompetitif? Apakah warga bebas mengkritik kepala daerah? Tuliskan penilaian awal Anda dengan skala 1–10, beserta satu alasan.

6.3 Peta Konsep



Gambar 6.1 Peta konsep Unit 5

6.4 Uraian Materi

6.4.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Unit 2 telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi. Menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, **desentralisasi** adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, sedangkan **otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Sejak reformasi, kabupaten dan kota memperoleh kewenangan, anggaran, dan pemimpin yang dipilih sendiri.

Dari sudut pandang ilmu politik, desentralisasi bukan sekadar pembagian urusan administratif. Ia memindahkan **arena perebutan kekuasaan** ke daerah. Jabatan kepala daerah, kursi DPRD, anggaran daerah, dan izin usaha menjadi sumber daya yang diperebutkan oleh aktor-aktor lokal.

6.4.2 Relasi Kekuasaan Pusat-Daerah

Tabel 6.1 Instrumen relasi kekuasaan pusat-daerah

Instrumen	Wujud	Implikasi politik
Regulasi	Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pembagian urusan	Pusat dapat menarik atau menambah kewenangan daerah
Fiskal	Dana transfer ke daerah dan dana desa	Banyak daerah KTI sangat bergantung pada transfer pusat
Pengawasan	Evaluasi perda dan rancangan APBD, pembinaan oleh kementerian dan gubernur	Pusat dapat mengoreksi kebijakan daerah
Politik	Rekomendasi pencalonan oleh pengurus partai tingkat pusat	Kandidat kepala daerah memerlukan restu elite partai nasional
Kekhususan	Otonomi khusus dan pemekaran daerah	Menjawab aspirasi lokal sekaligus membuka arena kekuasaan baru

6.4.3 Karakteristik Politik Lokal di Kawasan Timur Indonesia

Politik lokal di KTI memiliki beberapa ciri yang sering muncul dalam kajian, meskipun setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri. Pertama, **ketergantungan fiskal** yang tinggi pada pemerintah pusat membuat anggaran daerah menjadi sumber daya utama yang diperebutkan. Kedua, **ikatan kekerabatan, marga, dan adat** berperan kuat dalam mobilisasi politik. Ketiga, **kondisi geografis** kepulauan dan pedalaman memengaruhi akses warga terhadap layanan dan informasi politik.

Keempat, **pemekaran daerah** yang marak pascareformasi menciptakan jabatan dan anggaran baru. Kelima, di beberapa wilayah, **desentralisasi asimetris** melalui otonomi khusus menambah lapisan relasi kekuasaan tersendiri.

6.4.4 Poliarki Dahl sebagai Alat Ukur Demokrasi Lokal

Dahl (1971) memakai istilah **poliarki** untuk menyebut sistem politik nyata yang mendekati cita-cita demokrasi. Poliarki diukur pada dua dimensi: **kontestasi publik** (seberapa bebas pihak-pihak bersaing dan beroposisi) dan **inklusivitas** (seberapa luas warga berhak berpartisipasi). Dahl merumuskan delapan jaminan kelembagaan yang dapat diadaptasi untuk menilai demokrasi di daerah.

Tabel 6.2 Jaminan kelembagaan poliarki dan pertanyaan penilaian di tingkat daerah

Jaminan kelembagaan	Pertanyaan penilaian di daerah
Kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi	Apakah organisasi warga dan oposisi dapat bergerak tanpa tekanan?
Kebebasan berekspresi	Apakah warga dan media lokal bebas mengkritik pemerintah daerah?
Hak memilih	Apakah seluruh warga yang berhak tercatat dan dapat menggunakan hak pilihnya?
Hak dipilih untuk jabatan publik	Apakah pencalonan terbuka bagi berbagai kalangan, bukan hanya elite tertentu?
Hak pemimpin politik bersaing memperoleh dukungan	Apakah pilkada kompetitif, atau didominasi calon tunggal atau dinasti?
Sumber informasi alternatif	Apakah warga memperoleh informasi dari sumber yang beragam dan independen?
Pemilihan yang bebas dan adil	Apakah pelanggaran pilkada dapat dilaporkan dan ditindak?
Kebijakan bergantung pada suara dan preferensi warga	Apakah aspirasi warga benar-benar memengaruhi kebijakan daerah?

6.4.5 Menganalisis Kasus dengan Data Empiris Sekunder

Studi kasus dalam unit ini menggunakan **data empiris sekunder**, yaitu data yang telah dikumpulkan pihak lain dan tersedia untuk umum: dokumen peraturan daerah dan APBD, data KPU, laporan Bawaslu, publikasi BPS, artikel jurnal, dan pemberitaan media terverifikasi. Setiap klaim dalam laporan harus dapat ditelusuri ke sumbernya, dan klaim penting sebaiknya didukung minimal dua sumber. Analisis harus adil terhadap aktor yang dibahas: dugaan pelanggaran ditulis sebagai dugaan beserta sumbernya.

Struktur laporan studi kasus kelompok (1.200–1.500 kata)

1. Identifikasi masalah dan alasan pemilihan kasus.
2. Analisis relasi kekuasaan: aktor, kepentingan, dan institusi.
3. Evaluasi praktik demokrasi dengan kriteria poliarki.
4. Rekomendasi untuk memperkuat demokrasi lokal.
5. Daftar sumber data dan pustaka.

6.5 Studi Kasus

Kabupaten Kepulauan Seroja (kasus ilustrasi)

Kabupaten Kepulauan Seroja adalah daerah hasil pemekaran yang lebih dari 80% pendapatannya berasal dari dana transfer pusat. Pada pilkada terakhir, hanya ada satu pasangan calon karena hampir semua partai mendukung petahana, sehingga pemilih memilih antara pasangan calon dan kolom kosong. Media lokal utama dimiliki kerabat bupati. Organisasi mahasiswa asal daerah itu melaporkan kesulitan memperoleh izin untuk menggelar diskusi publik tentang anggaran daerah.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Instrumen relasi pusat-daerah apa yang paling berpengaruh dalam kasus ini?
2. Nilai kasus ini menggunakan minimal empat jaminan kelembagaan poliarki.
3. Faktor apa yang melemahkan demokrasi lokal di Kepulauan Seroja, dan apa rekomendasi Anda?

6.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 9 — Kasus otonomi daerah di KTI

Luring (kelas)

- Dosen membuka dengan peta konsep desentralisasi, lalu memandu diskusi panel kelas.
- Kelompok 3–4 orang menyajikan temuan awal kasus otonomi daerah KTI yang dipilih (5 menit); kelompok lain memberi tanggapan terstruktur.

Daring (LMS)

- Tonton video tentang kerangka desentralisasi dan peta relasi kekuasaan pusat-daerah.
- Pilih satu kasus otonomi daerah KTI dari berita atau dokumen resmi dan diskusikan di forum LMS.

Luaran: Ringkasan analisis individu 400–600 kata atas satu kasus otonomi daerah KTI: aktor, relasi kekuasaan, dan masalah utama.

Minggu 10 — Presentasi laporan studi kasus

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan laporan studi kasus (8–10 menit) diikuti tanya jawab terstruktur (5 menit); kelompok penonton wajib mengajukan minimal satu pertanyaan berbasis argumen.
- Dosen memberikan sintesis komparatif seluruh kasus dan mengaitkannya dengan teori demokrasi lokal.

Daring (LMS)

- Ikuti sesi umpan balik virtual atas draf laporan dan pelajari rubrik laporan dan presentasi.
- Unggah draf akhir laporan dan slide ke LMS sebelum sesi luring.

Luaran: Laporan studi kasus kelompok 1.200–1.500 kata dan slide presentasi 8–12 halaman.

6.7 Rangkuman

- Desentralisasi memindahkan arena perebutan kekuasaan ke daerah: jabatan, anggaran, dan izin menjadi sumber daya yang diperebutkan.
- Relasi pusat-daerah bekerja melalui instrumen regulasi, fiskal, pengawasan, politik, dan kekhususan.

- Politik lokal KTI dicirikan ketergantungan fiskal, ikatan kekerabatan dan adat, tantangan geografis, pemekaran, dan desentralisasi asimetris.
- Poliarki Dahl menilai demokrasi dari dimensi kontestasi dan inklusivitas melalui delapan jaminan kelembagaan.
- Studi kasus berbasis data sekunder harus dapat ditelusuri, ditriangulasi, dan ditulis secara adil.

6.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Dua dimensi poliarki menurut Dahl adalah ...
 - A. kewenangan dan anggaran
 - B. kontestasi publik dan inklusivitas
 - C. legalitas dan efektivitas
 - D. sentralisasi dan desentralisasi
2. Tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer pusat menunjukkan instrumen relasi pusat-daerah di bidang ...
 - A. politik
 - B. fiskal
 - C. kekhususan
 - D. pengawasan
3. Pilkada dengan satu pasangan calon melawan kolom kosong paling lemah pada jaminan poliarki ...
 - A. hak memilih
 - B. hak pemimpin politik bersaing memperoleh dukungan
 - C. kebebasan membentuk organisasi
 - D. sumber informasi alternatif
4. Media lokal yang seluruhnya dimiliki kerabat penguasa terutama melemahkan jaminan ...
 - A. sumber informasi alternatif
 - B. hak memilih
 - C. hak dipilih
 - D. pemilihan yang bebas
5. Data berikut yang termasuk data empiris sekunder adalah ...
 - A. wawancara yang dilakukan sendiri
 - B. publikasi BPS dan data KPU
 - C. angket buatan kelompok
 - D. pengamatan langsung di TPS

B. Uraian

1. Jelaskan bagaimana desentralisasi memengaruhi relasi kekuasaan di daerah. Berikan contoh dari satu daerah KTI.
2. Nilai kualitas demokrasi di satu kabupaten/kota KTI menggunakan minimal empat jaminan kelembagaan poliarki dan data sekunder.

6.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 6.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Poliarki diukur dari kontestasi publik dan inklusivitas partisipasi.
2	B	Dana transfer adalah instrumen fiskal.
3	B	Calon tunggal menunjukkan kompetisi yang minim.
4	A	Keragaman dan independensi sumber informasi terganggu.
5	B	Data sekunder dikumpulkan pihak lain dan tersedia untuk umum.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Konsep desentralisasi dan otonomi daerah tepat (skor maksimal 8).
- Pengaruh terhadap relasi kekuasaan dianalisis dengan minimal dua instrumen (skor maksimal 10).
- Contoh relevan dan bersumber (skor maksimal 7).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Empat jaminan dipilih dan dijelaskan tepat (skor maksimal 8).
- Penilaian didukung data sekunder yang bersumber (skor maksimal 12).
- Kesimpulan dan rekomendasi logis (skor maksimal 5).

6.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Gunakan Tabel 6.2 untuk menilai ulang kasus Kepulauan Seroja secara tertulis, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Bandingkan dua daerah KTI dengan karakteristik berbeda (misalnya daerah otonomi khusus dan daerah biasa) menggunakan kriteria poliarki dalam tulisan 400 kata.

6.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Apakah penilaian awal Anda (skala 1–10) berubah setelah memakai kriteria poliarki?
2. Kesulitan apa yang Anda temui dalam mencari data sekunder yang kredibel?
3. Bagaimana kelompok Anda memastikan laporan ditulis secara adil terhadap aktor yang dibahas?

NILAI ICHSA-N

Harmony dan **Nationalism**: menghargai perspektif rekan dari daerah asal yang berbeda dan memandang keragaman politik lokal sebagai kekayaan bangsa; **Integrity**: menyajikan data secara jujur dan bersumber.

6.12 Referensi Unit

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. (bacaan pengayaan)

BAB VII · UNIT 6 · MINGGU 11–13

Kepemiluan dan Partisipasi Politik

Sistem pemilu, regulasi kepemiluan Indonesia, dan faktor penentu partisipasi di daerah tertinggal dan KTI

7.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK6

Menganalisis dinamika kepemiluan dan partisipasi politik masyarakat pada konteks pemilihan umum/pilkada nasional dan lokal, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi di daerah tertinggal dan Kawasan Timur Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengklasifikasikan tipe sistem pemilu (mayoritarian, proporsional, campuran) dan menganalisis implikasinya terhadap representasi, fragmentasi partai, dan stabilitas pemerintahan.
- Mengidentifikasi kerangka regulasi kepemiluan Indonesia dan membandingkan dinamika pemilu nasional dengan pilkada di KTI.
- Mengidentifikasi bentuk partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional serta faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan geografis yang memengaruhinya.
- Membandingkan pola partisipasi di daerah maju dan daerah tertinggal berdasarkan data KPU, serta mengevaluasi kendala di wilayah kepulauan dan pedalaman.
- Mengonstruksi rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam konteks pilkada KTI.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-06	22%	3 minggu (1.530 menit)

7.2 Pemantik

Mari memulai

Di sebuah desa di pulau kecil, TPS terdekat berjarak dua jam perjalanan dengan perahu, dan cuaca buruk sering datang pada musim pemilihan. Di kota, TPS berada di ujung gang, tetapi banyak pemuda memilih tidak datang karena merasa "siapa pun yang menang, tidak ada yang berubah".

Keduanya sama-sama tidak memilih. Apakah penyebabnya sama? Apa yang harus dilakukan untuk masing-masing?

7.3 Peta Konsep



Gambar 7.1 Peta konsep Unit 6

7.4 Uraian Materi

7.4.1 Tipologi Sistem Pemilu

Sistem pemilu adalah aturan yang mengubah suara pemilih menjadi kursi atau jabatan. Pilihan sistem pemilu memengaruhi siapa yang terwakili, berapa banyak partai yang bertahan, dan seberapa stabil pemerintahan.

Tabel 7.1 Tipologi sistem pemilu

Tipe	Mekanisme	Kecenderungan dampak	Contoh
Mayoritarian/pluralitas	Kandidat dengan suara terbanyak (atau mayoritas) di satu daerah pemilihan memenangkan kursi	Cenderung sedikit partai dan pemerintahan stabil; banyak suara "terbuang"	Inggris; pemilihan presiden dua putaran di Prancis
Proporsional	Kursi dibagi sesuai persentase suara partai di daerah pemilihan berwakil banyak	Representasi lebih mencerminkan keragaman; cenderung banyak partai dan koalisi	Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia
Campuran	Menggabungkan unsur mayoritarian dan proporsional	Berupaya menyeimbangkan representasi dan stabilitas	Jerman, Selandia Baru

Kecenderungan bahwa sistem pluralitas mendorong sistem dua partai sering disebut sebagai hukum Duverger. Kecenderungan ini tidak mutlak, karena struktur sosial dan geografi juga berpengaruh.

7.4.2 Kerangka Kepemiluan Indonesia

Pemilu legislatif, presiden, dan DPD diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan pemilihan kepala daerah diatur dalam UU Pilkada (UU 1/2015 beserta perubahannya, antara lain UU 10/2016). Tahapan Pemilu 2024 diatur antara lain dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Secara ringkas:

- **DPR dan DPRD:** sistem proporsional daftar terbuka; calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- **DPD:** calon perseorangan; empat kursi per provinsi diberikan kepada calon dengan suara terbanyak.

- **Presiden dan wakil presiden:** pasangan terpilih harus meraih lebih dari 50% suara dengan sebaran minimal 20% di lebih dari separuh provinsi (UUD 1945 Pasal 6A); jika tidak tercapai, dilakukan putaran kedua.
- **Kepala daerah:** pasangan calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang; pilkada dilaksanakan serentak secara nasional pada 2024.

Penyelenggara pemilu terdiri atas KPU (pelaksana), Bawaslu (pengawas), dan DKPP (penegak kode etik penyelenggara). Sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

7.4.3 Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Budiardjo (2008) membedakan partisipasi yang bersifat otonom (atas kesadaran sendiri) dan yang dimobilisasi (digerakkan pihak lain).

Tabel 7.2 Bentuk partisipasi politik

Konvensional	Nonkonvensional
Memberikan suara dalam pemilu dan pilkada	Petisi dan kampanye daring
Ikut kampanye dan menjadi anggota partai	Unjuk rasa damai dan aksi massa
Menghubungi wakil rakyat atau pejabat	Boikot dan pembangkangan sipil
Menghadiri musrenbang dan forum warga	Gerakan sosial dan advokasi media

7.4.4 Faktor Penentu Partisipasi

Lipset (1960) menunjukkan bahwa partisipasi dan stabilitas demokrasi berkaitan dengan akar sosial seperti pendidikan, pendapatan, dan urbanisasi. Dahl (1971) menempatkan partisipasi inklusif sebagai salah satu dimensi poliarki. Secara umum, faktor penentu partisipasi dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 7.3 Faktor penentu partisipasi pemilih

Kelompok faktor	Contoh	Relevansi di KTI dan daerah 3T
Sosial-ekonomi	Pendidikan, pendapatan, pekerjaan	Pekerja musiman atau nelayan yang melaut saat hari pemungutan
Geografis dan infrastruktur	Jarak ke TPS, transportasi, cuaca	Pulau kecil dan pedalaman dengan akses terbatas
Kelembagaan	Akurasi daftar pemilih, sosialisasi, logistik	Keterlambatan logistik dan data pemilih yang belum mutakhir
Kultural	Norma komunitas, kepercayaan pada tokoh adat	Keputusan kolektif komunitas; sistem noken di sejumlah kabupaten di Papua yang pernah diakui Mahkamah Konstitusi
Psikologis-politik	Minat, rasa mampu memengaruhi, kepercayaan pada sistem	Apatisme ketika warga merasa pemilu tidak mengubah keadaan

7.4.5 Menganalisis Data Partisipasi dan Menyusun Rekomendasi

Gunakan data resmi KPU atau KPU daerah untuk membandingkan tingkat partisipasi antarwilayah. Langkahnya: (1) tentukan wilayah pembandingan, misalnya kecamatan daratan dan kepulauan; (2)

hitung atau kutip tingkat partisipasi; (3) cari penjelasan dengan faktor-faktor pada Tabel 7.3; (4) nilai implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal; dan (5) susun rekomendasi yang **spesifik dan terukur**, misalnya penambahan TPS di pulau berpenduduk tertentu, bukan sekadar "meningkatkan sosialisasi".

7.5 Studi Kasus

Partisipasi pemilih di Kabupaten Tanah Lestari (kasus ilustrasi)

Data KPU Kabupaten Tanah Lestari pada pilkada terakhir menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi di kecamatan ibu kota, tetapi jauh lebih rendah di tiga kecamatan kepulauan. Laporan pengawas mencatat logistik terlambat tiba di beberapa TPS kepulauan karena cuaca, dan sebagian pemilih terdaftar ternyata telah lama merantau. Di satu kecamatan pedalaman, partisipasi hampir penuh karena tokoh adat mengumpulkan warga untuk memilih bersama.

Catatan: kasus dan data bersifat ilustratif dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Identifikasi faktor penentu partisipasi di setiap wilayah menggunakan Tabel 7.3.
2. Apakah partisipasi tinggi di kecamatan pedalaman menunjukkan partisipasi otonom atau mobilisasi? Jelaskan.
3. Susun tiga rekomendasi yang spesifik dan terukur untuk KPU kabupaten.

7.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 11 — Sistem pemilu

Luring (kelas)

- Dosen menyajikan kuliah interaktif tentang tipologi sistem pemilu (20 menit) dengan contoh nyata.
- Kelompok kecil membahas dampak sistem pemilu Indonesia terhadap representasi daerah, khususnya KTI, lalu menyampaikan poin kunci (3 menit) dalam pleno.

Daring (LMS)

- Baca modul dan peraturan KPU yang relevan serta infografis komparatif sistem pemilu.
- Kerjakan kuis pra-kelas (5 soal) dan susun draf tabel komparatif.

Luaran: Tabel analisis komparatif individu minimal dua sistem pemilu dengan refleksi 200–300 kata tentang relevansinya bagi KTI.

Minggu 12 — Faktor penentu partisipasi

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan peta faktor determinan partisipasi di satu daerah KTI (6–8 menit).
- Kelompok lain mengkritisi dengan data atau argumen pembandingan; dosen menutup dengan sintesis.

Daring (LMS)

- Unduh data partisipasi pemilu/pilkada beberapa daerah KTI yang disediakan dosen.
- Posting hipotesis awal di forum "Mengapa partisipasi rendah di daerah tertentu?".

Luaran: Laporan mini kelompok 800–1.000 kata berisi peta faktor dan minimal tiga rekomendasi, disertai data pendukung.

Minggu 13 — Partisipasi di daerah tertinggal dan KTI

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka analisis partisipasi menurut Dahl dan Lipset (10 menit).
- Kelompok 4–5 orang menganalisis kasus berbasis data, lalu mempresentasikan temuan (5–7 menit per kelompok).
- Kuis analisis kasus singkat berbasis data partisipasi satu daerah KTI.

Daring (LMS)

- Tonton video pengantar tentang faktor penentu partisipasi dan konteks daerah tertinggal.
- Telaah dataset partisipasi pemilihan yang disediakan dan ikuti forum diskusi asinkron.

Luaran: Laporan analisis partisipasi politik 1.000–1.500 kata berbasis data resmi KPU dan minimal dua sumber pustaka.

7.7 Rangkuman

- Sistem pemilu mayoritarian, proporsional, dan campuran berdampak berbeda pada representasi, jumlah partai, dan stabilitas.
- Indonesia memakai sistem proporsional daftar terbuka untuk DPR dan DPRD, suara terbanyak untuk DPD, sistem mayoritas dengan syarat sebaran untuk presiden, dan suara terbanyak untuk pilkada.
- Partisipasi politik mencakup bentuk konvensional dan nonkonvensional, serta dapat bersifat otonom atau dimobilisasi.
- Partisipasi dipengaruhi faktor sosial-ekonomi, geografis, kelembagaan, kultural, dan psikologis; di KTI faktor geografis dan kelembagaan sangat menonjol.
- Rekomendasi peningkatan partisipasi harus spesifik, terukur, dan berbasis data.

7.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Sistem pemilu yang membagi kursi sesuai persentase suara partai disebut ...
 - A. mayoritarian
 - B. proporsional
 - C. pluralitas
 - D. distrik
2. Pemilu anggota DPR di Indonesia menggunakan sistem ...
 - A. distrik berwakil tunggal
 - B. proporsional daftar tertutup
 - C. proporsional daftar terbuka
 - D. campuran paralel

3. Syarat kemenangan pasangan presiden tanpa putaran kedua menurut UUD 1945 Pasal 6A adalah ...
 - A. suara terbanyak saja
 - B. lebih dari 50% suara dengan minimal 20% di lebih dari separuh provinsi
 - C. lebih dari 60% suara nasional
 - D. menang di seluruh provinsi
4. Warga yang datang ke TPS karena diarahkan tokoh berpengaruh, bukan atas kesadaran sendiri, merupakan contoh partisipasi ...
 - A. otonom
 - B. dimobilisasi
 - C. nonkonvensional
 - D. deliberatif
5. Keterlambatan logistik pemilu di pulau-pulau kecil termasuk faktor penentu partisipasi ...
 - A. psikologis
 - B. geografis dan kelembagaan
 - C. ideologis
 - D. sosial-ekonomi

B. Uraian

1. Bandingkan sistem pemilu mayoritarian dan proporsional dari sisi representasi dan stabilitas. Sistem mana yang lebih menguntungkan representasi daerah KTI? Jelaskan.
2. Analisis faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih di satu daerah KTI berdasarkan data KPU, lalu ajukan tiga rekomendasi yang spesifik dan terukur.

7.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 7.4 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Sistem proporsional membagi kursi sesuai persentase suara.
2	C	DPR dan DPRD dipilih dengan sistem proporsional daftar terbuka.
3	B	Pasal 6A ayat (3) mensyaratkan mayoritas dan sebaran suara.
4	B	Partisipasi yang digerakkan pihak lain disebut partisipasi yang dimobilisasi.
5	B	Akses geografis dan kapasitas penyelenggara memengaruhi partisipasi.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Perbandingan tepat pada dua aspek (skor maksimal 10).
- Analisis representasi daerah KTI logis dan berbasis contoh (skor maksimal 10).
- Argumen runtut (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Data dan sumber disajikan dengan benar (skor maksimal 8).
- Faktor penentu dianalisis dengan kerangka yang tepat (skor maksimal 9).
- Tiga rekomendasi spesifik dan terukur (skor maksimal 8).

7.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang pertanyaan kasus Tanah Lestari menggunakan Tabel 7.1–7.3 dan konsultasikan hasilnya di forum LMS sebelum mengerjakan ulang soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Pelajari data partisipasi pemilu di provinsi asal Anda dari situs KPU dan buat grafik sederhana perbandingan antarkabupaten disertai catatan 300 kata.

7.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Apakah Anda sendiri akan memilih pada pemilu berikutnya? Faktor apa yang memengaruhi keputusan Anda?
2. Temuan data mana yang paling mengejutkan Anda?
3. Bagaimana kelompok Anda memastikan rekomendasi benar-benar terukur?

NILAI ICHSA-N

Service dan **Nationalism**: menunjukkan kepedulian terhadap pemilih di daerah terpencil dan kelompok marjinal; **Integrity**: tidak menyalin pendapat atau data rekan tanpa atribusi.

7.12 Referensi Unit

- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Doubleday.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (bacaan pengayaan)
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press. (bacaan pengayaan)

BAB VIII · UNIT 7 · MINGGU 14–15

Laporan Analisis Politik Komprehensif

Mengintegrasikan konsep semester dalam laporan berbasis data dan mempertahankannya di depan kelompok sebaya

8.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK7

Menyusun laporan analisis politik komprehensif berbasis fakta empiris yang mengintegrasikan dinamika politik lokal, nasional, dan global—mencakup relasi kekuasaan, praktik demokrasi, dan isu kontemporer—dipresentasikan secara kritis di depan kelompok sebaya.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengintegrasikan konsep relasi kekuasaan, legitimasi, demokrasi, dan kepemiluan ke dalam satu kerangka analisis politik yang koheren.
- Menyusun laporan yang mengaitkan dinamika lokal KTI dengan konteks nasional dan global secara sistematis.
- Mempresentasikan temuan secara kritis dan mempertahankan argumen dengan bukti empiris dan referensi teoretis.
- Mengevaluasi laporan kelompok lain menggunakan kriteria akademik yang disepakati dan merespons masukan secara konstruktif.
- Menyempurnakan laporan berdasarkan umpan balik serta menunjukkan tanggung jawab atas akurasi data, kejujuran sumber, dan orisinalitas argumen.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-06	14%	2 minggu (1.020 menit)

8.2 Pemantik

Mari memulai

Bayangkan kelompok Anda diminta menjelaskan kasus yang dikaji selama semester kepada seorang jurnalis dalam tiga menit. Jurnalis itu bertanya: "Apa temuan terpenting kalian, mengapa itu terjadi, dan apa kaitannya dengan politik nasional atau dunia?"

Tuliskan jawaban kelompok Anda dalam tiga kalimat. Tiga kalimat itu adalah inti argumen laporan akhir Anda.

8.3 Peta Konsep



Gambar 8.1 Peta konsep Unit 7

8.4 Uraian Materi

8.4.1 Dari Kepingan Tugas ke Satu Analisis Utuh

Sepanjang semester, kelompok Anda telah menghasilkan topik dan justifikasi, *annotated bibliography*, matriks teori kekuasaan, studi kasus, serta analisis partisipasi. Laporan akhir bukan tumpukan tugas-tugas tersebut, melainkan **satu argumen utuh** yang menjawab satu pertanyaan analisis dengan memakai seluruh perangkat konseptual semester.

Tabel 8.1 Struktur laporan analisis politik komprehensif (3.000–4.500 kata)

Bagian	Isi	Konsep yang digunakan
1. Pendahuluan dan rumusan masalah	Latar kasus, pertanyaan analisis, argumen utama	Konsep dasar (Unit 1)
2. Kajian teoretis	Matriks komparatif minimal tiga teori kekuasaan dan kerangka sistem politik/model demokrasi sebagai lensa	Unit 2–4
3. Gambaran kasus dan data empiris	Profil daerah, aktor, data sekunder yang dapat ditelusuri	Unit 5–6
4. Analisis dan pembahasan	Relasi kekuasaan, legitimasi, praktik demokrasi, partisipasi; kaitan lokal-nasional-global	Seluruh unit
5. Simpulan dan refleksi kritis	Jawaban atas pertanyaan analisis, keterbatasan, dan agenda kajian lanjutan	—

8.4.2 Mengaitkan Lokal, Nasional, dan Global

Analisis yang komprehensif menunjukkan bagaimana peristiwa lokal terhubung dengan struktur yang lebih luas. Misalnya, konflik izin tambang di sebuah kabupaten dapat dikaitkan dengan kebijakan perizinan nasional dan permintaan komoditas global; rendahnya partisipasi di pulau terpencil dapat dikaitkan dengan desain sistem pemilu nasional; kampanye disinformasi dalam pilkada dapat dikaitkan dengan fenomena media sosial global. Tanyakan: aturan nasional apa yang membentuk kasus ini, dan kekuatan global apa yang ikut berperan?

8.4.3 Membangun Argumen Berbasis Bukti

Setiap paragraf analisis sebaiknya memuat tiga unsur: **klaim** (apa yang Anda nyatakan), **bukti** (data atau fakta yang mendukung, beserta sumbernya), dan **penalaran** (bagaimana teori menjelaskan hubungan antara bukti dan klaim). Akui penjelasan alternatif dan keterbatasan data; kejujuran ini justru memperkuat kredibilitas laporan.

Contoh paragraf analisis (ilustrasi)

"Dominasi satu keluarga dalam tiga periode pilkada di Kabupaten X (klaim) terlihat dari data KPU yang menunjukkan pasangan calon dari keluarga tersebut selalu diusung koalisi mayoritas partai (bukti). Pola ini lebih tepat dijelaskan dengan konsep hegemoni Gramsci daripada pluralisme Dahl, karena dukungan warga dibangun melalui jaringan kultural dan ekonomi yang membuat dominasi tersebut dianggap wajar, bukan melalui kompetisi terbuka antarkelompok (penalaran)."

8.4.4 Presentasi Kritis dan Peer Evaluation

Presentasi berlangsung 15–20 menit dengan tanya jawab 10 menit. Gunakan 10–15 slide dengan prinsip satu slide satu gagasan dan cantumkan sumber setiap data. Setiap anggota wajib mampu menjawab pertanyaan tentang bagian mana pun dari laporan. Sebagai audiens, ajukan minimal satu pertanyaan atau tanggapan substantif dan isi formulir *peer evaluation* secara jujur dan konstruktif.

8.4.5 Revisi, Integritas, dan Refleksi

Setelah presentasi Minggu 14, kelompok merevisi laporan berdasarkan catatan umpan balik dan mencatat perubahan yang dilakukan. Pastikan seluruh sumber dikutip, pernyataan penggunaan GenAI dicantumkan bila ada, dan naskah lolos pemeriksaan kemiripan sesuai ketentuan Rencana Tugas. Bagian refleksi kritis menunjukkan perkembangan pemahaman Anda dari konsep dasar di awal semester menuju analisis integratif.

8.5 Studi Kasus**Menilai kesiapan draf laporan (ilustrasi)**

Draf laporan sebuah kelompok memuat matriks delapan pemikir yang sangat lengkap dan data partisipasi pemilih dari tiga pilkada. Namun, bagian pembahasan hanya menceritakan kronologi peristiwa tanpa memakai teori, tidak ada kaitan dengan konteks nasional atau global, dan dua data penting tidak disertai sumber.

Pertanyaan analisis:

1. Kriteria rubrik mana yang paling lemah pada draf tersebut?
2. Susun tiga saran perbaikan yang spesifik untuk kelompok itu.

8.6 Aktivitas Pembelajaran**Minggu 14 — Presentasi draf dan peer evaluation****Luring (kelas)**

- Setiap kelompok mempresentasikan draf laporan (15–20 menit) dan menjawab pertanyaan (10 menit); dosen memberi umpan balik lisan.
- Kelompok lain mengisi formulir *peer evaluation* menggunakan rubrik yang disepakati.

Daring (LMS)

- Pelajari panduan laporan, contoh kerangka analisis integratif, dan rubrik presentasi di LMS.
- Selesaikan draf secara kolaboratif dan manfaatkan konsultasi virtual.

Luaran: Draft laporan 2.500–3.500 kata dan slide 10–15 halaman sebagai bahan revisi.

Minggu 15 — Presentasi final dan refleksi

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan laporan final yang telah direvisi dan menjawab pertanyaan mendalam dari dosen dan kelompok lain.
- Dosen menutup perkuliahan dengan sintesis yang menghubungkan kembali topik-topik inti semester.

Daring (LMS)

- Revisi laporan secara kolaboratif berdasarkan catatan Minggu 14 dan catat perubahan yang dilakukan.
- Pelajari panduan refleksi pembelajaran individual dan unggah laporan final beserta lembar kontribusi.

Luaran: Laporan final 3.000–4.500 kata, slide presentasi, catatan revisi, dan lembar kontribusi individu.

8.7 Rangkuman

- Laporan akhir adalah satu argumen utuh yang memakai seluruh perangkat konseptual semester.
- Strukturnya meliputi pendahuluan, kajian teoretis, gambaran kasus dan data, analisis dan pembahasan, serta simpulan dan refleksi.
- Analisis komprehensif mengaitkan dinamika lokal dengan struktur nasional dan global.
- Setiap paragraf analisis memuat klaim, bukti bersumber, dan penalaran teoretis.
- Presentasi kritis, peer evaluation, revisi, dan kejujuran akademik merupakan bagian dari mutu laporan.

8.8 Latihan: Swa-Nilai Laporan Akhir

Sebelum presentasi final, nilai laporan kelompok Anda dengan daftar periksa berikut. Beri skor 0 (belum), 1 (sebagian), atau 2 (sudah baik). Skor maksimum 20; tingkat penguasaan = $(\text{jumlah skor} \div 20) \times 100\%$.

Tabel 8.2 Daftar periksa laporan dan presentasi

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
1	Rumusan masalah tajam dan kasus KTI dijustifikasi dengan konsep ilmu politik.	
2	Matriks memuat minimal tiga teori kekuasaan pada dimensi asal, sifat, dan mekanisme.	
3	Kerangka sistem politik atau model demokrasi dipakai sebagai lensa analisis.	
4	Data empiris sekunder beragam, mutakhir, dan bersumber jelas.	
5	Analisis memakai teori, bukan sekadar kronologi peristiwa.	
6	Dinamika lokal dikaitkan dengan konteks nasional dan global.	
7	Simpulan menjawab rumusan masalah dan memuat refleksi kritis.	
8	Sitasi konsisten; pernyataan GenAI dicantumkan bila digunakan.	
9	Slide 10–15 halaman, ringkas, dan mencantumkan sumber data.	
10	Setiap anggota siap menjawab pertanyaan tentang seluruh bagian laporan.	
	Jumlah	

8.9 Rubrik Penilaian Laporan dan Presentasi Final

Laporan dan presentasi final dinilai menggunakan kriteria dan bobot pada Rencana Tugas Mahasiswa RPS.

Tabel 8.3 Rubrik final project

Kriteria (bobot)	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
a. Perumusan masalah dan relevansi kasus (10%)	Tajam, spesifik KTI, justifikasi konseptual kuat	Jelas dan relevan	Kurang fokus	Tidak jelas
b. Kajian teoretis dan matriks komparatif (25%)	Matriks ≥3 teori lengkap dan akurat; lensa analisis tepat	Lengkap dengan sedikit kekeliruan	Sebagian dimensi kosong atau keliru	Tanpa matriks atau lensa
c. Kualitas dan penggunaan data empiris (20%)	Sahih, beragam, mutakhir, konsisten mendukung argumen	Sebagian besar sahih dan relevan	Data terbatas atau kurang terolah	Tanpa data atau tidak bersumber
d. Kedalaman analisis dan koherensi argumen (25%)	Kritis, teoretis, koheren antarbagian	Logis dengan sedikit lompatan	Dangkal atau deskriptif	Tidak logis
e. Presentasi dan tanya jawab kritis (20%)	Jelas, slide efektif, setiap anggota menjawab tepat	Jelas dan memadai	Kurang jelas; sebagian anggota tidak mampu menjawab	Tidak jelas

Persiapan UAS (Minggu 16)

UAS mengukur Sub-CPMK5–Sub-CPMK7 melalui laporan final dan presentasi analisis politik. Pastikan laporan final dikumpulkan melalui LMS sesuai tenggat pada Rencana Tugas, lembar kontribusi ditandatangani semua anggota, dan setiap anggota siap mempertanggungjawabkan bagiannya. Ketentuan lengkap UAS disajikan pada Bab Asesmen Sumatif.

8.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki butir daftar periksa yang masih bernilai 0 atau 1, konsultasikan draf kepada dosen, dan lakukan swa-nilai ulang sebelum pengumpulan final.
≥ 90% (pengayaan)	Ubah satu temuan utama laporan menjadi artikel opini 700 kata untuk media lokal dengan tetap menjaga akurasi dan etika penulisan.

8.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Bagaimana kemampuan analisis Anda berkembang dari Unit 1 hingga laporan akhir?
2. Umpan balik mana yang paling mengubah laporan kelompok Anda?
3. Kontribusi apa yang paling Anda banggakan, dan apa yang ingin Anda perbaiki di mata kuliah berikutnya?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan **Adaptability**: jujur mengakui keterbatasan analisis dan terbuka terhadap perspektif alternatif; **Harmony**: memberi kritik yang membangun kepada kelompok lain; **Service**: menempatkan ilmu politik untuk kemajuan demokrasi di KTI.

8.12 Referensi Unit

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Doubleday.

BAB IX · ASESMEN SUMATIF

Asesmen Sumatif dan Integrasi Penilaian

Peta penilaian, kisi-kisi UTS dan UAS, rubrik, dan pengukuran ketercapaian CPMK serta CPL

9.1 Prinsip Asesmen

Asesmen mata kuliah ini dirancang dengan prinsip keselarasan konstruktif: setiap instrumen mengukur Sub-CPMK tertentu dan kriterianya disampaikan kepada mahasiswa sejak awal. Asesmen bersifat **otentik** (menggunakan kasus dan produk nyata), **berkelanjutan** (formatif dan sumatif), **transparan** (rubrik diumumkan), serta **akuntabel** (nilai dicatat per Sub-CPMK sehingga ketercapaian CPMK dan CPL dapat ditelusuri di SI-OBE).

9.2 Peta Komponen Penilaian dan Sub-CPMK

Sesuai desain RPS, penilaian dilihat dari dua sudut pandang yang saling melengkapi. **Bobot komponen** (Tabel 1.10) menentukan nilai akhir dan kelulusan. **Bobot Sub-CPMK** (Tabel 1.6) menentukan ketercapaian CPL. Tabel berikut menunjukkan Sub-CPMK yang diukur oleh setiap komponen.

Tabel 9.1 Peta komponen penilaian dan Sub-CPMK

Komponen (bobot)	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	SC7
Kuis Konsep (20%)	✓	✓	✓				
Matriks Analitis (15%)			✓	✓			
UTS (25%)	✓	✓	✓	✓			
Studi Kasus Lokal (15%)					✓	✓	
UAS (laporan dan presentasi) (25%)					✓	✓	✓

SC = Sub-CPMK. Pemetaan mengikuti tabel Pemetaan Asesmen Formatif dan Sumatif pada RPS (Bagian 3.3).

9.2.1 Perhitungan Nilai Akhir dan Ketercapaian

1. **Nilai akhir** = $\Sigma (\text{nilai komponen} \times \text{bobot komponen}) \div 100$, menggunakan bobot pada Tabel 1.10.
2. **Nilai Sub-CPMK** = rata-rata skor butir atau komponen yang mengukur Sub-CPMK tersebut. Untuk komponen yang mengukur beberapa Sub-CPMK (misalnya UTS), gunakan skor per butir soal sesuai Sub-CPMK-nya.
3. **Ketercapaian CPL** = rata-rata tertimbang nilai Sub-CPMK dengan bobot pada kolom CPL di Tabel 1.6. Ketercapaian CPMK dihitung dari Sub-CPMK penyusunnya (Tabel 1.5).

Tabel 9.2 Contoh perhitungan untuk seorang mahasiswa (data ilustrasi, disederhanakan)

Komponen	Kuis	Matriks	UTS	Studi Kasus	UAS
Nilai (0–100)	78	82	72	80	76

Sub-CPMK	1	2	3	4	5	6	7
Nilai	75,00	75,00	77,33	77,00	78,00	78,00	76,00

Hasil	Nilai
Nilai akhir	76,90 (huruf B)
Ketercapaian CPL-02	75,61
Ketercapaian CPL-06	77,41

Pada contoh ini, nilai Sub-CPMK dihitung dari rata-rata sederhana nilai komponen karena skor per butir tidak ditampilkan. Dalam praktik, gunakan skor per butir agar nilai setiap Sub-CPMK lebih akurat. Ambang ketercapaian adalah skor 70; bila kurang dari 75% mahasiswa mencapai ambang pada suatu CPL, dilakukan intervensi berupa remedial, pengayaan, sesi asistensi, atau revisi metode dan asesmen.

9.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS

UTS dilaksanakan pada Minggu 8 dalam bentuk tes tertulis esai analitis selama 100 menit dan mencakup Sub-CPMK1–4. Skor soal disusun proporsional terhadap bobot Sub-CPMK pra-UTS (15 : 14 : 14 : 7). Kriteria umum penilaian mengikuti RPS: ketepatan konsep (35%), kedalaman analisis (40%), dan keterkaitan antarkonsep antarminggu (25%).

Tabel 9.3 Kisi-kisi UTS

No.	Sub-CPMK	Indikator yang diukur	Level	Skor
1	Sub-CPMK1	Menjelaskan lima konsep dasar ilmu politik dan hubungan antarkonsep	C2	15
2	Sub-CPMK1	Menganalisis cara legitimasi kekuasaan dibangun dan dipertahankan	C4	15
3	Sub-CPMK2	Mengklasifikasikan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tipe legitimasi pada kasus	C4	28
4	Sub-CPMK3	Membandingkan satu pemikir klasik dan satu kontemporer pada dimensi asal, sifat, dan mekanisme	C4	28
5	Sub-CPMK4	Memetakan kasus ke model sistem Easton dan menilai model demokrasi yang relevan	C4	14
			Jumlah	100

Contoh naskah UTS — Kabupaten Bukit Harapan (ilustrasi)

Kabupaten Bukit Harapan di Kawasan Timur Indonesia dipimpin bupati yang terpilih dua periode melalui pilkada. Ia juga keturunan keluarga pemangku adat dan dikenal sebagai orator yang memikat. Menjelang

akhir masa jabatannya, bupati mendorong kerabatnya maju sebagai calon pengganti. Media lokal yang dekat dengan keluarga bupati menampilkan pencalonan itu sebagai "kelanjutan tradisi". Sekelompok mahasiswa dan organisasi perempuan menggelar forum warga, menuntut transparansi anggaran, dan mengirim petisi kepada DPRD. DPRD menggelar rapat dengar pendapat, dan pemerintah daerah akhirnya menerbitkan peraturan bupati tentang keterbukaan data anggaran.

Kasus ini fiktif dan disusun untuk keperluan ujian.

Soal:

1. Jelaskan kelima konsep dasar ilmu politik dan tunjukkan kemunculan masing-masing dalam kasus. (15)
2. Analisis sumber legitimasi bupati dan calon penggantinya. Bagaimana legitimasi itu dibangun dan dipertahankan? (15)
3. Klasifikasikan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang menjadi kerangka kasus ini serta tipe-tipe legitimasi yang muncul, lalu susun dalam matriks klasifikasi singkat disertai bukti dari kasus. (28)
4. Bandingkan cara pandang satu pemikir klasik dan satu pemikir kontemporer dalam menjelaskan dominasi keluarga bupati, menggunakan dimensi asal, sifat, dan mekanisme kekuasaan. (28)
5. Petakan tuntutan transparansi anggaran hingga terbitnya peraturan bupati ke dalam model sistem Easton, lalu tentukan model demokrasi yang paling tercermin. (14)

Tabel 9.4 Pedoman penskoran UTS

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
1	Definisi lima konsep tepat (8); kemunculan dalam kasus ditunjukkan (7).
2	Tipe legitimasi diidentifikasi (6); mekanisme pembangunan dan pemeliharaan legitimasi dianalisis dengan bukti kasus (9).
3	Klasifikasi bentuk negara dan sistem pemerintahan tepat (10); tipe legitimasi tepat (8); matriks runtut dengan bukti (10).
4	Gagasan kedua pemikir tepat (10); perbandingan pada tiga dimensi (12); penerapan pada kasus (6).
5	Komponen Easton dipetakan tepat (8); model demokrasi dipilih dengan justifikasi (6).

9.4 Ketentuan dan Kisi-Kisi UAS

Sesuai RPS, UAS tidak berbentuk tes tertulis, melainkan penilaian **laporan final dan presentasi analisis politik komprehensif** yang mengukur Sub-CPMK5–7. Laporan final dikumpulkan melalui LMS sesuai tenggat Rencana Tugas, dan presentasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dosen. Nilai UAS dihitung dengan rubrik final project (Tabel 8.3); nilai individu dapat dikurangi hingga 20%

dari nilai kelompok apabila anggota tidak mampu menjawab pertanyaan dasar tentang bagian yang diklaim dikerjakannya.

Tabel 9.5 Kisi-kisi UAS: kriteria rubrik dan Sub-CPMK yang dibuktikan

Kriteria rubrik (bobot)	Sub-CPMK utama	Bukti yang dinilai
a. Perumusan masalah dan relevansi kasus (10%)	Sub-CPMK5	Kasus politik lokal KTI dan justifikasi konseptualnya
b. Kajian teoretis dan matriks komparatif (25%)	Sub-CPMK7	Integrasi teori kekuasaan, sistem politik, dan model demokrasi
c. Kualitas dan penggunaan data empiris (20%)	Sub-CPMK5, Sub-CPMK6	Data sekunder tentang relasi kekuasaan, kepemiluan, dan partisipasi
d. Kedalaman analisis dan koherensi argumen (25%)	Sub-CPMK5, Sub-CPMK6	Analisis relasi kekuasaan, legitimasi, demokrasi, dan partisipasi
e. Presentasi dan tanya jawab kritis (20%)	Sub-CPMK7	Kejelasan argumen, kualitas slide, jawaban tiap anggota

9.5 Rubrik Penilaian Komponen

Rubrik final project disajikan pada Tabel 8.3. Rubrik berikut melengkapi rubrik pada RPS untuk komponen lainnya.

Kuis Konsep. Soal pilihan ganda dinilai dengan kunci jawaban. Butir isian singkat dan analisis kasus dinilai dengan rubrik berikut; kuis pendek Unit 3 memakai bobot ketepatan konsep 40%, kedalaman analisis komparatif 40%, dan kejelasan argumen 20% sesuai RPS.

Tabel 9.6 Rubrik butir isian dan analisis kasus pada Kuis Konsep

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan konsep	Definisi dan istilah tepat sesuai sumber	Tepat dengan sedikit kekeliruan	Sebagian keliru	Keliru
Kedalaman analisis	Menerapkan konsep secara tajam pada kasus	Penerapan memadai	Penerapan dangkal	Tidak menerapkan konsep
Relevansi contoh dan kejelasan	Contoh relevan, argumen jelas	Contoh cukup relevan	Contoh kurang tepat	Tanpa contoh

Tabel 9.7 Rubrik Matriks Analitis (matriks klasifikasi dan matriks teori kekuasaan)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kelengkapan matriks	Semua kasus/pemikir dan dimensi terisi	Hampir lengkap	Banyak sel kosong	Tidak lengkap
Ketepatan konseptual	Isian akurat sesuai kriteria baku dan sumber	Sebagian besar akurat	Beberapa kekeliruan penting	Banyak kekeliruan
Kedalaman perbandingan	Perbandingan tajam dan argumentatif	Perbandingan memadai	Sekadar daftar	Tidak membandingkan
Bukti tekstual dan empiris	Rujukan eksplisit dan contoh empiris relevan	Rujukan cukup	Rujukan minim	Tanpa rujukan

Tabel 9.8 Rubrik Studi Kasus Lokal (laporan studi kasus dan laporan partisipasi)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Identifikasi masalah	Tajam, spesifik, dan relevan dengan KTI	Jelas	Kurang fokus	Tidak jelas
Analisis relasi kekuasaan dan partisipasi	Aktor, kepentingan, institusi, dan faktor partisipasi dianalisis mendalam	Memadai	Deskriptif	Tidak ada analisis
Evaluasi kriteria demokrasi	Kriteria poliarki diterapkan dengan bukti	Diterapkan sebagian	Disebut tanpa penerapan	Tidak ada
Rekomendasi	Spesifik, terukur, berbasis data	Cukup spesifik	Umum	Tidak ada
Data dan sitasi	Data resmi, ditriangulasi, sitasi konsisten	Sebagian besar bersumber	Sumber terbatas	Tanpa sumber

Tabel 9.9 Rubrik holistik partisipasi dan sikap (nilai ICHSA-N)

Aspek	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Partisipasi dan sikap	Selalu aktif dengan kontribusi bernas; jujur dalam mengutip; menghargai perbedaan; adaptif terhadap kritik; membantu rekan; tertib dan menjaga keselamatan diri serta lingkungan belajar	Aktif dan berkontribusi baik; jujur; menghargai pendapat; cukup adaptif	Kadang berkontribusi; perlu diingatkan soal atribusi, sikap, atau ketertiban	Pasif, tidak jujur, mendominasi atau mengabaikan pendapat lain

9.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Pada akhir semester, dosen pengampu menganalisis rekap ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL dari SI-OBE, hasil umpan balik mahasiswa terhadap modul (Lampiran 8), serta catatan pelaksanaan pembelajaran. CPL yang dicapai kurang dari 75% mahasiswa pada ambang 70 menjadi prioritas perbaikan materi, aktivitas, atau instrumen asesmen. Hasilnya dilaporkan dalam Portofolio Mata Kuliah dan menjadi dasar peninjauan RPS serta revisi modul sesuai siklus PPEPP.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Agregasi kepentingan	Fungsi menggabungkan berbagai tuntutan menjadi alternatif kebijakan, terutama oleh partai politik.
Artikulasi kepentingan	Fungsi menyatakan tuntutan kelompok kepada pembuat keputusan.
Demokrasi deliberatif	Model demokrasi yang menekankan musyawarah publik dan pertukaran argumen secara rasional.
Demokrasi liberal	Model demokrasi yang menekankan perwakilan, pemilihan kompetitif, dan perlindungan hak.
Demokrasi partisipatoris	Model demokrasi yang menekankan keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan.
Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.
Federasi	Bentuk negara yang kedaulatannya dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian berdasarkan konstitusi.
Hegemoni	Dominasi kelompok tertentu yang dipertahankan melalui persetujuan yang dibangun secara moral dan intelektual (Gramsci).
Ideologi	Seperangkat gagasan yang menjelaskan masyarakat, menggambarkan cita-cita, dan mengarahkan tindakan politik.
Kedaulatan	Kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara.
Kekuasaan	Kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain sesuai kehendak pemiliknya.
Kontrak sosial	Gagasan bahwa negara lahir dari kesepakatan warga (Hobbes, Locke, Rousseau).
Kuasa-pengetahuan	Konsep Foucault bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling membentuk dan menopang.
Legitimasi	Keyakinan warga bahwa kekuasaan yang dijalankan sah dan patut ditaati.
Negara kesatuan	Bentuk negara dengan kedaulatan tunggal di pemerintah pusat.
Otonomi daerah	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Partisipasi politik	Kegiatan warga yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
Pluralisme	Pandangan bahwa kekuasaan tersebar di antara banyak kelompok yang bersaing (Dahl).
Poliarki	Istilah Dahl untuk sistem politik nyata yang mendekati demokrasi, diukur dari kontestasi publik dan inklusivitas.
Sistem parlementer	Sistem pemerintahan dengan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Sistem pemilu proporsional	Sistem yang membagi kursi sesuai persentase suara partai.

Istilah	Pengertian
Sistem politik	Keseluruhan interaksi yang mengalokasikan nilai secara otoritatif, meliputi input, konversi, output, dan umpan balik (Easton).
Sistem presidensial	Sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dipilih untuk masa jabatan tetap.
Sistem semipresidensial	Sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan eksekutif antara presiden terpilih dan perdana menteri.
Volonté générale	Kehendak umum rakyat sebagai sumber kedaulatan menurut Rousseau.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Utama

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2017). *Political Ideologies: An Introduction* (6th ed.). Palgrave Macmillan.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Doubleday.

Pustaka Pendukung

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Prentice-Hall.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- Machiavelli, N. (1532/2009). *The Prince*. Penguin Classics.
- Rousseau, J.-J. (1762/1968). *The Social Contract*. Penguin Classics.

Bacaan Pengayaan

- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

LAMPIRAN 1

Formulir Pengajuan Topik Proyek Akhir

Nama kelompok dan anggota	
Kasus politik lokal/regional KTI	
Rumusan masalah sementara	
Justifikasi relevansi teoretis (konsep dan teori yang akan dipakai)	
Rencana sumber data sekunder	
Persetujuan dosen	

LAMPIRAN 2

Templat Annotated Bibliography

No.	Rujukan lengkap	Ringkasan isi	Relevansi dengan kasus
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

LAMPIRAN 3

Templat Matriks Klasifikasi Negara, Sistem Pemerintahan, dan Legitimasi

Kasus	Bentuk negara dan buktinya	Sistem pemerintahan dan buktinya	Tipe legitimasi dan buktinya	Penilaian kesesuaian

LAMPIRAN 4

Templat Matriks Analitis Teori Kekuasaan

Pemikir	Asal kekuasaan	Sifat	Mekanisme	Implikasi legitimasi
Aristoteles				
Machiavelli				
Hobbes				
Locke				
Rousseau				
Dahl				
Foucault				
Gramsci				

LAMPIRAN 5

Formulir Peer Evaluation Presentasi

Kelompok penyaji	
Kelompok penilai	

Kriteria	Skor (1–4)	Catatan
Kejelasan rumusan masalah		
Ketepatan penggunaan teori		
Kualitas data dan sumber		
Kedalaman analisis dan kaitan lokal-nasional-global		
Kualitas presentasi dan jawaban		

Kekuatan utama	
Saran perbaikan	

LAMPIRAN 6

Lembar Kontribusi Individu

Nama anggota	NIM	Bagian yang dikerjakan	Persentase kontribusi	Tanda tangan

LAMPIRAN 7

Lembar Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan GenAI

Saya/kami menyatakan bahwa tugas berjudul merupakan hasil kerja saya/kami sendiri. Seluruh sumber telah dikutip sesuai kaidah, dan data yang digunakan tidak dikarang atau dimanipulasi. Penggunaan GenAI dinyatakan sebagai berikut.

(a) Alat GenAI yang digunakan	
(b) Bagian tugas yang dibantu	
(c) Prompt yang digunakan	
(d) Modifikasi mandiri yang dilakukan	
(e) Refleksi atas penggunaan GenAI	

☐ Saya/kami tidak menggunakan GenAI dalam tugas ini.

Gorontalo, ...

(.....)

NIM

LAMPIRAN 8

Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul

Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4
1	Capaian pembelajaran setiap unit dinyatakan dengan jelas.				
2	Uraian materi mudah dipahami oleh mahasiswa semester pertama.				
3	Studi kasus membantu saya memahami politik lokal, nasional, dan global.				
4	Aktivitas pembelajaran membantu saya mencapai Sub-CPMK.				
5	Latihan dan kunci jawaban membantu saya mengukur penguasaan.				
6	Rubrik penilaian jelas dan adil.				
7	Proyek akhir membangun kemampuan analisis politik saya.				
8	Tampilan dan tata letak modul memudahkan belajar.				
9	Nilai ICHSA-N tercermin dalam kegiatan pembelajaran.				
10	Secara keseluruhan, modul ini bermanfaat bagi saya.				

Bagian modul yang paling membantu	
Bagian modul yang perlu diperbaiki	
Saran lain	